



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP
KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PADA
PERUSAHAAN PUBLIK YANG TERCATAT DI BEI
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG
LISTING DI BEI)**

SKRIPSI



**PINTONOV SULUNG PUTRA
07 153 046**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT penguasa alam semesta yang telah melimpahkan rahmat yang begitu besar kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Publik Yang Terdaftar di BEI (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI)". Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Tiada kata yang dapat penulis ucapkan selain rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT dan semua pihak yang telah membantu menyumbangkan tenaga, pikiran, serta semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini sendiri tanpa arahan, bimbingan, dan kritikan yang diberikan kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. *Papa dan Mama tersayang, Syafdinal S.Pd dan Zuherni S.Pd, yang telah memberikan semangat, dukungan baik moril dan materil, do'a serta kasih sayang dan cinta yang tulus yang tak terhingga besarnya. Kepada adik ku tersayang Rizki Esa, terimakasih atas segala dukungan untuk abang sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk Tek Nen, terima kasih pengertiannya. Semoga berkah dan ridho Allah selalu menaungi kehidupan kita semua. I Love u so much.*

2. Bapak Prof. Dr. H. Syafruddin Karimi, S.E, MA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
3. Bapak Dr. H. Yuskar, S.E, MA, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
4. Bapak Drs. Riwayadi, MBA, Ak., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
5. Ibu Dra.Hj. Rahmi Desriani, M.Si, Ak, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan tulus dan ikhlas dalam penyelesaian skripsi.
6. Bapak Drs. Rinaldi Munaf, M.M, CPA, Ak., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dalam menjalani perkuliahan di Jurusan Akuntansi.
7. Ibu Dra. Nini Sofriyeni, M.Si, Ak., selaku dosen penelaah pada seminar skripsi.
8. Ibu Dr. Yulia Hendri Yeni, S.E, M.T, Ak dan Ibu Dra.Hj. Warnida, M.Si, Ak, selaku dosen penguji kompre, terimakasih untuk arahan dan nasehatnya.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi penulis ke depannya.
10. Staf Administrasi biro jurusan Akuntansi Da Ari, Mama Loli, Ni Iffa, terimakasih atas semangat, bantuan dan kerjasamanya selama ini.

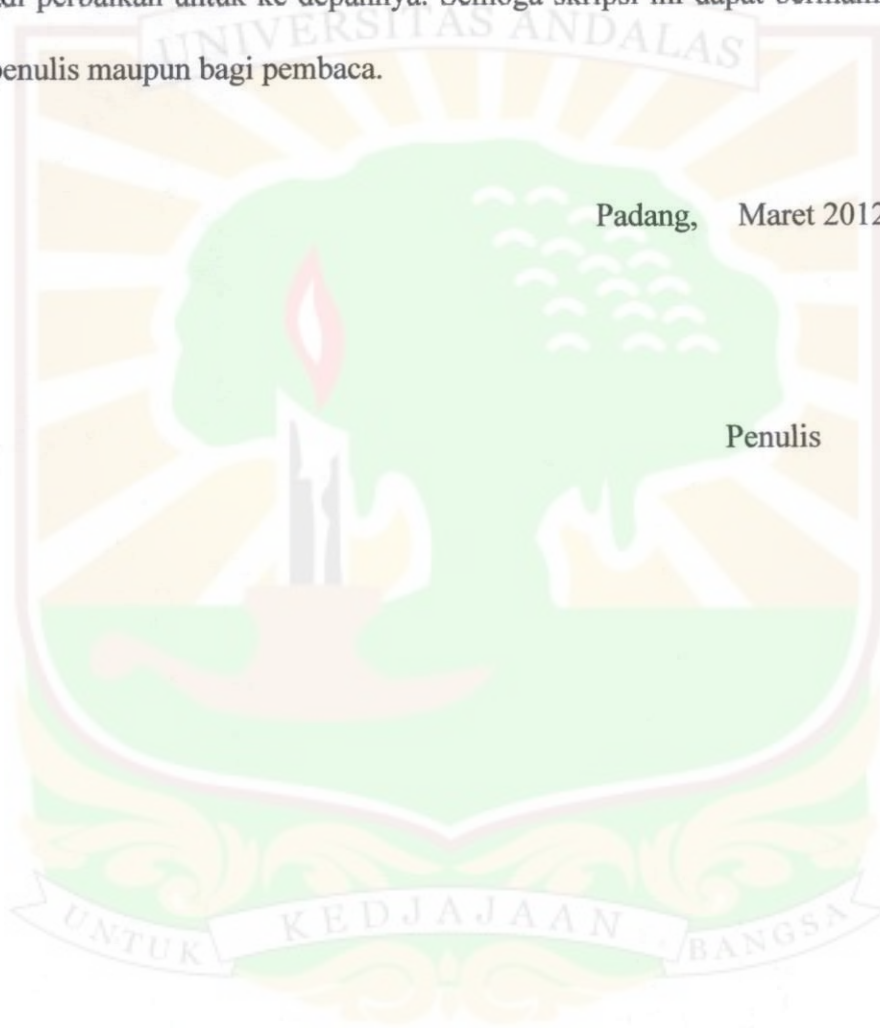
11. My Uni, Allevia Syarif, S.E, Allev orang yang paling bisa membuat nto bangkit dalam segala hal. Kalau kebaikan Allev itu laut, maka terima kasih nto hanya setetes air dari laut itu. Semoga cita-cita dan doa kita terkabul sayang. *Let's continue our journey !!! Ti amo...*
12. My bro, Alta, Dicky, Febby, Ikhsan, Raymond. Terimakasih atas waktu dan kebersamaannya selama ini. Yang alun, dipacapek se lah bro :p. Lanjutkan kesuksesan kita bro, jangan berhenti sampai disini aja !!!
13. Buat pipi, rere,dicky, febby arief, angga, diah, rudolf, ane, bicenk, binyok, icha, k'ci, laura, dkk, terima kasih jadi mentor penulis sebelum kompre.
14. Sahabat-sahabat Akuntansi 07, teman-teman seperjuangan. Di tunggu reuniannya nanti. ☺
15. Teman-teman panitia AOC XXII. *Sanasib, Saraso.....!!*
16. Kakak-kakak, Abang-abang dan adik-adik di Akuntansi UNAND yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak dan tetap semangat.
17. Untuk kawan sapalalokkan di Aur Duri sampai di Filano. Elfa, besok2 tolong aku design rumah ndan ☺. Luthfi, Ravi, Revo, capek tamat ndan ☺, ngontrak lagi kito di tempat lain. Diko & Ricky "Jin", ikuti be kato orang tuo di rumah tu, ambek yang baik-baiknyo be. Semoga kita sukses di bidang masing-masing. Forza budak bangko ☺
18. Kakak-kakak dari Departmen Keuangan Jakarta, terima kasih atas kerjasama nya dalam penyediaan data bagi penulis.
19. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis, memberikan arahan, masukan, bantuan tenaga dan pikiran yang tidak dapat penulis sebutkan

satu persatu. Sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Penulisan skripsi ini tentunya belumlah sempurna, masih banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu penulis harapkan kekurangan itu dapat menjadi perbaikan untuk ke depannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pembaca.

Padang, Maret 2012

Penulis



No. Alumni Universitas:	PINTONOV SULUNG PUTRA	No. Alumni Fakultas:
a) Tempat/Tgl Lahir : Koto Baru / 12 November 1989 b) Nama Orang Tua : Syafdinal S.Pd dan Zuherni S.Pd c) Fakultas : Ekonomi d) Jurusan : Akuntansi e) No.BP : 07153046 f) Tgl Lulus : 26 Maret 2012 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,15 i) Lama Studi : 4 Tahun 7 Bulan j) Alamat Orang Tua : Jl.Teuku Umar No.54 Kec.Bangko, Kab.Merangin, Jambi		

PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PUBLIK YANG TERCATAT DI BEI

(Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang listing di BEI)

Skripsi S1 Oleh : Pintonov Sulung Putra

Pembimbing : Dra.Hj. Rahmi Desriani, M.Si, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada 52 perusahaan publik yang tercatat di BEI tahun 2008-2010. Karakteristik komite audit yang diuji adalah keanggotaan komite audit, independensi anggota komite audit, proporsi komisaris independen, ketua komite audit independen, kompetensi anggota komite audit. Sementara untuk ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan di lihat berdasarkan aturan Bapepam dan LK No. Kep-134/BL/2006.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang *listing* di BEI di pengaruhi oleh kompetensi anggota komite audit. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keanggotaan komite audit, independensi anggota komite audit, proporsi komisaris independen dan ketua komite audit independen tidak berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan tahunan perusahaan. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin kompeten komite audit yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, maka akan semakin tepat waktu pelaporan keuangan perusahaan.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal:9 Januari 2012.
Abstrak telah disetujui oleh pembimbing dan penguji :

Tanda Tangan		
Nama Terang	Dra.Hj.Rahmi Desriani, M.Si, Ak	Dra. Nini Sofriyeni, M.Si, Ak

Mengetahui :
Ketua Jurusan Akuntansi:

Dr. H. Yuskar, SE. MA. Ak
NIP. 196009111986031001

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus :

		Petugas Fakultas / Universitas	
No. Alumni Fakultas :		Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumni Fakultas :		Nama :	Tanda Tangan :

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Good Corporate Governance	10
2.1.1 Pengertian Good Corporate Governance	10
2.1.2 Komite Audit dan Corporate Governance	13
2.2 Komite Audit	14
2.2.1 Pengertian Komite Audit	14
2.2.2 Tujuan Pembentukan Komite Audit	17
2.2.3 Peran dan Tanggung Jawab Komite Audit	20
2.2.4 Struktur Komite Audit	22
2.2.5 Keanggotaan Komite Audit	25

2.2.6	Independensi Komite Audit	27
2.2.7	Komisaris Independen	27
2.2.8	Kompetensi	31
2.3	Ketepatan Waktu Pelaporan	33
2.4	Penelitian Terdahulu	37
2.5	Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian	41
2.5.1	Keanggotaan Komite Audit	42
2.5.2	Independensi Komite Audit	43
2.5.3	Proporsi Komisaris Independen	44
2.5.4	Ketua Komite Audit	45
2.2.5	Kemampuan di Bidang Akuntansi dan Keuangan	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
3.1	Populasi dan Penentuan Sampel	48
3.2	Jenis dan Sumber Data	48
3.2.1.	Jenis data	48
3.2.2	Sumber data	49
3.3	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	49
3.3.1	Ketepatan waktu	50
3.3.2	Keanggotaan Komite Audit	51
3.3.3	Independensi anggota Komite Audit	51
3.3.4	Proporsi Komisaris Independen	52

3.3.5 Ketua Komite Audit	53
3.3.6 Kompetensi	53
3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian	54
3.5 Prosedur Pengumpulan Data	55
3.6 Teknik Analisis Data	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Statistik Deskriptif	58
4.1.1. Deskripsi Data	58
4.1.2. Hasil Statistik Deskriptif	59
4.1.3. Hasil Deskriptif untuk Masing-Masing Variabel	61
4.2. Hasil Analisis dan Pembahasan	64
4.2.1. Persyaratan Analisis	64
4.2.2. Hasil Analisis Regresi Logistik	65
1) Menilai Kelayakan Model Regresi	65
2) Menilai keseluruhan model (Overall model fit)	65
3) Menguji Koefisien Regresi	66
4) Uji Koefisien Determinansi (R^2)	68
4.2.3. Pembahasan	68
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan Penelitian	73
5.2. Implikasi	74
5.3 Keterbatasan Penelitian	75
5.4. Saran	75

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	40
Tabel 3.1. Variabel penelitian dan indikator penelitian	48
Tabel 4.1. Proses Seleksi Sampel Berdasarkan kriteria	59
Tabel 4.2. Deskriptif Statistik	59
Tabel 4.3. Keanggotaan Komite Audit Crosstabulation	61
Tabel 4.4. Independensi Anggota Komite Audit Crosstabulation	62
Tabel 4.5. Proporsi Komisaris Independen Crosstabulation	62
Tabel 4.6. Ketua Komite Audit Crosstabulation	63
Tabel 4.7. Kompetensi Keahlian Keuangan Crosstabulation	63
Tabel 4.8. Matrik Koefisien Korelasi	64
Tabel 4.9. Hosmes and Lemeshow	65
Tabel 4.10. -2 Log <i>Likelihood</i> awal	66
Tabel 4.11. -2 Log <i>Likelihood</i> akhir	66
Tabel 4.12. Hasil Uji Analisis Regresi Logistik	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

GAMBAR 2.1 Kerangka pemikiran 47



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Komite audit pada saat ini telah diakui dan diterima sebagai suatu bagian dari tata kelola organisasi perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Selain itu kehadiran komite audit akhir-akhir ini telah mendapat respon yang positif dari berbagai pihak, antara lain Pemerintah, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Bursa Efek Indonesia (BEI), Para Investor, Profesi Hukum (Advokat), Profesi Akuntan Publik serta Independent Appraisal.

Komite audit di Indonesia masih merupakan hal yang relatif baru. Perkembangan komite audit di negara Indonesia sangat terlambat dibandingkan dengan negara lain. Hal tersebut antara lain disebabkan Pemerintah baru saja menetapkan kebijakan tentang pemberlakuan komite audit pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertentu pada tahun 1999. Selain itu anjuran dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) kepada perusahaan yang telah *go publik* agar memiliki Komite Audit baru ditetapkan pada tahun 2000. Mengingat pentingnya keberadaan Komite Audit dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian, maka Komite Audit perlu mendapatkan perhatian dari manajemen dan Dewan Komisaris serta pihak-pihak terkait yang bertindak sebagai regulator seperti Menteri keuangan, Menteri BUMN, Bapepam & Bursa Efek Indonesia.

Keberadaan Komite Audit dan Komisaris Independen pada perusahaan publik di Indonesia ditandai dengan keluarnya Keputusan Direksi Bursa Efek

Jakarta (BEJ) No. Kep-339/BEJ/07-2001 perihal: Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A, tentang ketentuan umum pencatatan efek bersifat ekuitas di Bursa. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) wajib memiliki Komite Audit dan Komisaris Independen. Peraturan ini secara efektif diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2001.

Berdasarkan Peraturan Pencatatan Efek No. I-A, Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris perusahaan publik yang mencatatkan diri di BEI yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Tugas Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris melakukan pemeriksaan yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Komite Audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi.

Terbentuknya Komite Audit pada perusahaan-perusahaan di banyak negara merupakan ciri dari *Corporate Governance* yang mulai terbentuk dengan baik. Keberadaan komite ini merupakan persyaratan bagi perusahaan yang *listed* di *New York Stock Exchange* (NYSE) sejak akhir tahun 1970 dan menjadi ketentuan hukum di Kanada sejak pertengahan tahun 1970. Di beberapa negara, ketentuan mengenai keberadaan komite ini berangsur-angsur diterima sebagai suatu kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Di Indonesia, keberadaan Komite Audit telah ditetapkan melalui keputusan Bapepam yang dituangkan dalam Surat Edaran Bapepam No. SE.03/PM/2000 mengenai pembentukan Komite Audit dan juga Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta

No. Kep-339/BEJ/07-2001 mengenai peraturan pencatatan efek di bursa yang mencakup Komisaris Independen, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan; Keterbukaan; dan Standar laporan keuangan per sektor.

Pedoman *Good Corporate Governance* dipersiapkan dan disusun oleh *Task Force* Komite Audit yang dibentuk oleh Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* (KNGCG) dengan tujuan agar dunia bisnis memiliki acuan dasar yang memadai mengenai konsep serta pola pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang sesuai dengan pola internasional umumnya dan Indonesia pada khususnya. Pedoman ini juga memberikan bimbingan kepada perusahaan Indonesia dalam pembentukan komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris perusahaan.

Berdasarkan peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5, tugas dan tanggung jawab Komite Audit secara garis besar mencakup penelaahan (*review*) atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya, melaporkan kepada komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh direksi, serta penerapan praktek-praktek tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Oleh karena itu keberadaan Komite Audit terkait dengan *Good Corporate Governance* dan dapat dijadikan tolak ukur bagi suatu perusahaan, apakah sudah melaksanakan *Good Corporate Governance* dengan baik atau belum.

Komite Audit dibentuk untuk membantu *Board of Directors*, minimal dalam hal integritas laporan keuangan perusahaan, ketaatan perusahaan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, independensi dan kualitas auditor independen,

dan kinerja fungsi audit internal perusahaan dan kinerja auditor independen, yang secara spesifik dinyatakan dalam *New York Stock Exchange Corporate Accountability and Listing Standard Commite* tanggal 6 Juni 2002 (NYSE,2002). Bahkan *Auditing Standard Board* mengeluarkan *Statement on Auditing Standards No.90: Audit Committee Communications*, yang mewajibkan auditor mendiskusikan kualitas prinsip akuntansi yang diterapkan di perusahaan (ASB,1999). *The Blue Ribbon Committee on Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committee* menyatakan bahwa Komite Audit akan meningkatkan proses pelaporan keuangan apabila anggota-anggotanya independen, paham laporan keuangan, memberikan waktu yang cukup dan mengadakan rapat secara teratur (BRC,1999).

Untuk mendukung tercapainya tujuan pembentukan Komite Audit, Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun *New York Stock Exchange* (NYSE) mensyaratkan independensi Komite Audit, keberadaan komisaris independen dan keberadaan minimal satu orang anggota Komite Audit yang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang akuntansi atau keuangan. Terkait dengan Komisaris Independen (sekaligus menjadi ketua Komite Audit) peraturan BEI menyatakan bahwa keberadaannya dimaksudkan untuk melindungi pemegang saham minoritas. Peraturan BEI dalam surat No. Kep-339/BEJ/07-2001 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, bahwa persyaratan menjadi Komisaris Independen yaitu:

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan yang bersangkutan.

2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur dan atau komisaris lainnya perusahaan yang bersangkutan.
3. Tidak bekerja sebagai direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan.
4. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Bryan *et al* (2004) melakukan penelitian mengenai pernyataan *The Blue Ribbon Committee* (BRC) dengan memandang kualitas pelaporan keuangan dari segi *earning informativeness* dan transparansi. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Komite Audit yang efektif dan independen meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Penelitian mengenai hubungan antara keberadaan Komite Audit dan ketiadaan masalah dalam pelaporan keuangan dilakukan oleh Defond dan Jambalvo (1994), Beasley (1996), Dechow (1996). Sedangkan penelitian terkait dengan Komisaris Independen yaitu tentang *grey area director* dilakukan oleh Vicknair, Hickman dan Carnes (1993).

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Di dalam pelaksanaan tugasnya komite menyediakan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal, dan auditor internal (Bradbury *et al*, 2004).

Adanya komunikasi formal antara komite audit, auditor internal, dan auditor eksternal akan menjamin proses audit internal dan eksternal dilakukan dengan baik. Proses audit internal dan eksternal yang baik akan meningkatkan

akurasi laporan keuangan dan kemudian meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Salah satu komponen penting dalam pelaksanaan *good corporate governance* adalah komite audit yang melaksanakan fungsi pengawasan pelaporan keuangan perusahaan (Anderson *et al*, 2003).

Ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Peraturan tersebut menyatakan bahwa semua perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan keuangan tersebut kepada masyarakat. Peraturan mengenai penyampaian laporan keuangan pada tahun 1996 dengan peraturan No. Kep-38/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selambat-lambatnya akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Namun, semenjak 7 Desember 2006 peraturan tersebut diperbarui dengan peraturan X.K.2 No. Kep-134/BL/2006 yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif selambat-lambatnya empat (empat) bulan setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Perusahaan yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan akan dikenakan sanksi administrasi dan denda. Sanksi dan denda yang dikenakan cukup berat, namun demikian masih ada beberapa perusahaan yang tidak dapat menyampaikan laporan keuangan tepat waktu walaupun sudah dibentuk Komite Audit.

1.2. Perumusan Masalah

Komite Audit dan Komisaris Independen dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Salah satu parameter keberhasilan pelaksanaan *good corporate governance* yaitu meningkatnya integritas laporan keuangan perusahaan yang antara lain terlihat dari ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan. Di Indonesia, permasalahan dalam pelaporan keuangan perusahaan publik dapat dilihat dari adanya sanksi dari Bapepam sebagai pembina dan pengawas pasar modal. Masalah ketepatan waktu pelaporan dapat diminimalkan dengan pelaksanaan *good corporate governance*, salah satunya dengan peningkatan peran dan fungsi Komite Audit sebagai komite independen dalam perusahaan yang memiliki peran dan fungsi utama dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan, meningkatkan keyakinan publik serta mengurangi peluang terjadinya kecurangan dalam perusahaan. Bapepam dalam peraturannya No. SE-03/PM/2000 menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya Komite Audit antara lain adalah membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan. Peningkatan peran dan fungsi Komite Audit antara lain dapat dilihat dari keanggotaan Komite Audit, independensi, kompetensi serta frekuensi pertemuan para anggota komite audit. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah keanggotaan Komite Audit mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang listing di BEI?

4. Bagi pemerintah atau Bapepam, ketidaktepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan mencerminkan keefektifan regulasi, khususnya regulasi tentang penyampaian laporan keuangan.
5. Bagi penulis, dapat menambah wawasan penulis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Tinjauan pustaka, bab ini membahas teori-teori dan hasil penelitian-penelitian empiris yang relevan dalam membangun hipotesis mengenai hubungan antara karakteristik Komite Audit dengan ketepatan waktu pelaporan.
- BAB III** : Metode Penelitian, bab ini menguraikan dan menjelaskan populasi, sampel yang digunakan dan teknik pengambilan sampel serta variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan model analisis untuk pengujian hipotesis.
- BAB IV** : Hasil dan Pembahasan, dalam bab ini menyajikan hasil pengolahan data dan analisisnya dalam rangka pengujian hipotesis serta pembahasan.
- BAB V** : Penutup, dalam bab ini menyajikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dengan keterbatasan serta saran untuk penelitian mendatang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Good Corporate Governance (GCG)

Ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah salah satu atribut dari tata kelola perusahaan yang baik yang diidentifikasi oleh OECD dan Bank Dunia. Pemegang saham dan pemilik kepentingan lainnya membutuhkan informasi saat itu juga yang terbaru dan memiliki jarak yang sedikit antara akhir tahun dan tanggal pelaporan keuangan, semakin lama waktu pelaporan keuangan, maka semakin banyak informasi yang tidak bisa digunakan dan menjadi nilai kurang untuk laporan keuangan tersebut (OECD, 2008).

Salah satu cara untuk mengukur transparansi dan kualitas pelaporan keuangan adalah ketepatan waktu. Rentang waktu antara tanggal laporan keuangan perusahaan dan tanggal ketika informasi keuangan diumumkan ke publik berhubungan dengan kualitas informasi keuangan yang dilaporkan (McGee, 2007).

2.1.1 Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Secara umum, *Good Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. *Good Corporate Governance* dapat pula diartikan sebagai

Pengawas dalam melaksanakan tugasnya, yaitu membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern, efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.”

Penelitian yang dilakukan oleh Kalbers dan Forgary (1993) menemukan dua variabel utama yang menentukan keberhasilan Komite Audit, yaitu kewenangan yang secara statuta diberikan kepada komite dan keahlian yang dimiliki dan kemauan menggunakan kompetensi oleh para anggota komite. Dalam usulan dan laporan studi yang lain, masalah independensi dan komposisi anggota komite ditemukan sebagai faktor penting dalam kesuksesan Komite Audit (Baysinger dan Butler, 1985; Vicknair *et al*, 1993).

Untuk lebih efektif, Komite Audit harus memperoleh masukan dari sub komite lainnya terutama *Komite Risk Management* mengenai identifikasi dan penanganan resiko penting perusahaan. Di samping itu, Komite Audit juga harus komunikatif terutama dengan auditor eksternal dan internal audit, sehingga mereka memiliki jalur cepat dalam mengkomunikasikan hal-hal yang signifikan yang perlu diketahui oleh Komite Audit.

2.1.2 Komite Audit dan *Corporate Governance*

Komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance* terutama transparansi dan *disclousure* diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif (Tjager dkk, 2003). Dalam ruang lingkup *corporate governance*, tanggung jawab komite audit adalah untuk menyediakan keyakinan

mengenai komite audit. Sejalan dengan kecendrungan internasional tersebut, persyaratan semacam ini juga telah ditetapkan di Indonesia melalui Pedoman *Good Corporate Governance* yang diterbitkan pada bulan Mei 2002 (Toha, 2004).

Pengertian Komite Audit adalah sejumlah dewan komisaris perusahaan yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan indenpendensinya dari manajemen. Di dalam perusahaan, komite audit sangat berguna untuk menangani masalah-memasalah yang membutuhkan integrasi dan koordinasi sehingga dimungkinkan permasalahan-permasalahan yang signifikan atau penting dapat segera teratasi (Hiro,2007).

Menurut arens (2006) pengertian Komite Audit adalah sebagai berikut :

“ An audit committee is a selected numbers of members of company's board of directors whose responsibilities include helping auditors remain independent of management. Most audit committee are made up of three to five or sometimes as many as seven directors who are not a part of company management. “

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi BUMN, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 ayat (1) dan (2), Komite Audit adalah:

“Komisaris/Dewan Pengawas wajib membentuk Komite Audit, yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite audit bersifat mandiri baik dalam

2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengendalian Intern maupun Auditor Eksternal;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya;
4. Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan BUMN;
5. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris serta tugas-tugas Komisaris lainnya; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris yang tidak terbatas pada:
 - a. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai BUMN, serta rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran BUMN, laporan manajemen, dan informasi lainnya;
 - b. Melakukan penelaahan atas ketaatan BUMN terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan BUMN;
 - c. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN;
 - d. Mengkaji kecukupan fungsi audit internal, termasuk jumlah audit, rencana kerja tahunan dan penugasan yang telah dilaksanakan;
 - e. Mengkaji kecukupan pelaksanaan audit eksternal termasuk di dalamnya perencanaan audit dan jumlah auditornya.

Komite audit juga bertugas sebagai pihak penengah apabila terjadi selisih pendapat antara manajemen dan auditor mengenai interpretasi dan penerapan

2.2.3 Peran dan Tanggung Jawab Komite Audit

Peranan dan tanggungjawab Komite Audit harus dengan jelas tercantum dalam ketentuan-ketentuan Audit Committee Charter. Peran dan tanggungjawab Komite Audit akan berlainan tergantung kondisi suatu perusahaan tertentu, namun pada dasarnya akan mengarah pada pemberian bantuan kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya tentang kontrol intern dan pelaporan keuangan dan manajemen (KNGCG:2002). Dalam peran dan tanggungjawab komite audit harus termasuk:

A. Pelaporan keuangan

Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggungjawab Komite Audit adalah:

1. Pengawasan atas proses pelaporan keuangan dengan menekankan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi.
2. Memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota Komite Audit, dan
3. Mengawasi audit laporan keuangan eksternal dan menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal.

B. Manajemen Risiko dan Kontrol

Dalam hal manajemen risiko dan kontrol, peran dan tanggung jawab Komite Audit adalah:

3. Memeriksa kasus-kasus penting yang berhubungan dengan benturan kepentingan, perbuatan yang merugikan perusahaan, dan kecurangan;
4. Keharusan auditor internal untuk melaporkan hasil pemeriksaan *Corporate Governance* dan temuan-temuan penting lainnya.

Di Indonesia melihat betapa pentingnya keberadaan Komite Audit yang efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan, maka serangkaian ketentuan mengenai Komite Audit telah diterbitkan, antara lain sebagai berikut :

1. Pedoman *Good Corporate Governance* (Maret, 2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki Komite Audit.
2. Surat Edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik memiliki Komite Audit, sebagaimana diperbaharui dengan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan No. IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
3. Kep. 339/BEJ/07-2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Jakarta memiliki Komite Audit.
4. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-103/MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai Komite Audit. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai Komite Audit.

2.2.4 Struktur Komite Audit

Struktur komite audit di Indonesia diatur dalam Kep. Men.117/2002 untuk perusahaan BUMN dan untuk perusahaan publik terdapat dalam Peraturan

Bapepam. Menurut Peraturan No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. Kep-29/PM/2004 tgl 24 September 2004, tertulis bahwa struktur komite audit dalam pedoman pembentukan komite audit adalah sebagai berikut :

1. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;
2. Anggota komite audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit. Dalam hal komisaris independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit.

Syarat lainnya untuk menjadi anggota komite audit sesuai aturan No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 adalah sebagai berikut :

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman, yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya;

2.2.5 Keanggotaan Komite Audit

Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Jumlah keanggotaan komite audit sesuai Surat Edaran dari Direksi PT. BEJ No SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 perihal keanggotaan komite audit, disebutkan sekurang-kurangnya tiga orang, termasuk ketua komite audit. Ketua komite audit berasal dari komisaris independen, sedangkan anggota lainnya berasal dari pihak eksternal perusahaan yang independen.

Ketentuan mengenai keanggotaan komite audit juga diatur dalam Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 tanggal 5 Mei 2000 dan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) No. Kep-315/BEJ/06/2000. Bunyinya, keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota, seorang di antaranya merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen di mana sekurang-kurangnya satu di antaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan

Berdasarkan Komite Nasional Good Corporate Governance, Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris. Anggota Komite Audit diangkat oleh Dewan Komisaris atau setidaknya oleh Komite Nominasi. Anggota Komite Audit terdiri dari orang-orang yang independen, seperti komisaris yang tidak terlibat dalam pengurusan perusahaan dan pihak-pihak yang terafiliasi. Komite Audit paling sedikit terdiri atas 3 orang anggota (KNGCG:2002).

pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komisaris independen memiliki peranan penting dalam memonitor perusahaan (FCGI, 2003).

Keberadaan Komisaris Independen diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih objektif, dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholders lainnya. Peran komisaris independen diharapkan mampu mendorong diterapkannya prinsip dan praktek *corporate governance* pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia, termasuk BUMN (FCGI, 2003).

Dalam Undang-undang Perseroan Terbuka (UUPT) Nomor 40 tahun 2007 disebutkan bahwa anggaran dasar suatu perseroan dapat mengatur mengenai komposisi Dewan Komisaris yang di dalamnya terdapat Komisaris Independen. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Code of Good Corporate Governance*) tahun 2006 juga menyebutkan bahwa Dewan Komisaris dapat terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen. Namun bagi Perseroan Terbuka, terdapat kewajiban untuk memiliki Komisaris Independen dengan komposisi sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi.

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris.

Keberadaan Komisaris Independen diwajibkan BEI melalui Surat keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004, yang menyatakan bahwa perusahaan yang mencatikan diri di Bursa harus mempunyai Komisaris Independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas. Tujuan diangkatnya Komisaris Independen melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Syarat-syarat seorang komisaris Independen menurut peraturan BEJ Nomor : Kep-339/BEJ/07-2001 adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) perusahaan yang bersangkutan;
2. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya perusahaan yang bersangkutan;
3. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan;
4. Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

5. Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2.2.7 Kemampuan di Bidang Akuntansi dan Keuangan (Kompetensi)

Pengetahuan dalam akuntansi dan keuangan memberikan dasar yang baik bagi anggota komite audit untuk memeriksa dan menganalisis informasi keuangan. Latar belakang pendidikan menjadi ciri penting untuk memastikan komite audit melaksanakan peran mereka secara efektif. Anggota komite audit yang menguasai keuangan akan lebih profesional dan cepat beradaptasi terhadap perubahan dan inovasi (Hambrick dan Mason, 1984 dalam Rahmat 2008).

Fraud manajemen dan penyimpangan pengawasan internal juga akan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan. Beberapa pelacakan *fraud* tertentu tergantung pada pengalaman dan kompetensi yang dimiliki oleh komite audit. Menurut Dezoort dkk (2002) dalam Putra (2010) menyatakan bahwa kompetensi komite audit akan meningkatkan sebuah salah saji material yang ditemukan akan dikomunikasikan dan dikoreksi secepatnya.

Komite audit dengan anggota yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan diharapkan akan menjadi lebih efektif. Keberadaan personal yang memenuhi syarat sebagai anggota komite audit diharapkan dapat mengadopsi standar akuntabilitas dan tingkat prestasi yang tinggi, dapat menyediakan bantuan dalam peran mengontrol dan pengawasan, dan berusaha keras untuk citra dan kinerja perusahaan yang lebih baik sehingga komite audit dengan kompetensi yang baik dapat mengurangi jumlah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian McMullen dan

4. Pengalaman dalam pengendalian internal
5. Pemahaman atas akuntansi untuk penaksiran (*estimates*), *accruals*, dan cadangan (*reserves*)

2.3 Ketepatan Waktu Pelaporan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007) bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi yang eleven akan bermanfaat bagi para pemakai apabila tersedia tepat waktu sebelum pemakai kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil.

Menurut Hendriksen (2002) ketepatan waktu mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan pada suatu interval waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi (*forecast*) dan keputusan.

Menurut Scott (2003) dalam Rachmawati (2008) mendefinisikan informasi sebagai bukti yang mempunyai potensi untuk mempengaruhi keputusan individual. Ketepatan waktu diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

Menurut IAI (2002) dalam Saleh (2004) bahwa tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Saleh (2004) menyatakan bahwa informasi yang relevan

laporan keuangan yang disajikan manajemen perlu verifikasi apakah telah sesuai dengan standar pelaporan yang berterima umum. Pilihan antara segera mengumumkan laporan keuangan atau menunda adalah merupakan pertimbangan *costbenefit* (Utami, 2006).

Setiap perusahaan yang *listing* di BEI wajib melakukan pelaporan ke bursa sebagaimana yang tertulis pada Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK peraturan No. Kep-38/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, bahwa setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahun kepada Bursa selambat-lambatnya akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Disini juga tertulis bahwa laporan tahunan wajib memuat laporan keuangan tahunan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal. Namun, semenjak 7 Desember 2006 peraturan tersebut diperbarui dengan peraturan No. Kep-134/BL/2006 yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif selambat-lambatnya empat (empat) bulan setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Dengan demikian batas waktu penyampaian laporan tahunan kepada Bursa adalah 31 April dan keterlambatan waktu penyampaian laporan keuangan dinyatakan jika telah melewati batas waktu yang ditetapkan tersebut.

Mengingat pentingnya pelaporan laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik ini, maka bagi perusahaan yang terlambat dari aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bapepam akan dikenakan sanksi administratif. Berdasarkan Lampiran Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-307/BEJ/07-2004

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *corporate governance*, membuktikan bahwa penerapan prinsip *corporate governance* dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Beasley *et al.*, 1996). Selanjutnya, hasil penelitian Chtourou *et al* (2001) bahwa penerapan prinsip *corporate governance* akan menjadi *constrain* dari manipulasi yang dilakukan oleh manajemen. Abbott *et al* (2000) juga membuktikan adanya hubungan positif antara penerapan *corporate governance* dengan berkurangnya kecurangan (*fraud*) pada pelaporan keuangan yang dapat meningkatkan kualitas pelaporan yang dipublikasikan.

Wiedman (2002) menyatakan beberapa faktor seperti *corporate governance*, *board independen*, *audit committees expertise*, *the role of auditor* dan independensi auditor mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Mayangsari dan Murtanto (2002) menguji apakah pengumuman pembentukan Komite Audit merupakan hal yang penting dalam *corporate governance* di Indonesia di respon oleh pasar. Penelitian tersebut membuktikan adanya reaksi pasar yang positif terhadap pengumuman tersebut dilihat dari pengaruhnya terhadap return saham. Hal ini mengindikasikan bahwa pengumuman tersebut mempunyai kandungan informasi (*information content*) yang menarik minat investor di pasar. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang listing di BEI.

Bryan *et al* (2004) melakukan penelitian mengenai BRC dengan memandang kualitas pelaporan keuangan dari segi *earning informativeness* dan transparansi. Hasil penelitian menyatakan bahwa Komite Audit yang efektif dan independen meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Penelitian ini memperluas waktu dan spesifikasi perusahaan yang menjadi sampel dari penelitian terdahulu dengan variabel yang sama yaitu, karakteristik Komite Audit terdiri dari Keanggotaan Komite Audit, Independensi Komite Audit, proporsi Komisaris Independen, Ketua Komite Audit dan Kompetensi Komite Audit. Namun, perbedaan dengan penelitian terdahulu bahwa penelitian ini menghubungkan karakteristik komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan dengan rentang waktu 3 tahun, sedangkan penelitian terdahulu hanya 1 tahun. Selain itu, perusahaan yang dijadikan sampel yaitu perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2010, sedangkan sebelumnya sampel di pilih secara acak dari semua perusahaan *go public* yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kerangka konseptual dan hipotesis dari penelitian yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai diuraikan sebagai berikut:

2.5.1 Keanggotaan Komite Audit

Peraturan BEI dalam surat edaran dengan nomor Kep.Direksi BEJ No.339 tahun 2001 menyatakan bahwa kedudukan Komite Audit berada dibawah Dewan Komisaris dan salah seorang Komisaris Independen sekaligus menjadi ketua Komite Audit. Komite Audit terdiri sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar emiten. Tujuan diadakannya Komite Audit dan Komisaris Independen adalah dalam rangka pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Salah satu parameter terlaksananya *good corporate governance* yaitu meningkatkan ketepatan pelaporan keuangan perusahaan. Ketepatan waktu

pelaporan keuangan perusahaan dapat dilihat dari ada atau tidaknya sanksi dari Bapepam sebagai pembina dan pengawas Pasar Modal.

H₀A : Keanggotaan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang listing di BEI.

H₁A : Keanggotaan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang listing di BEI.

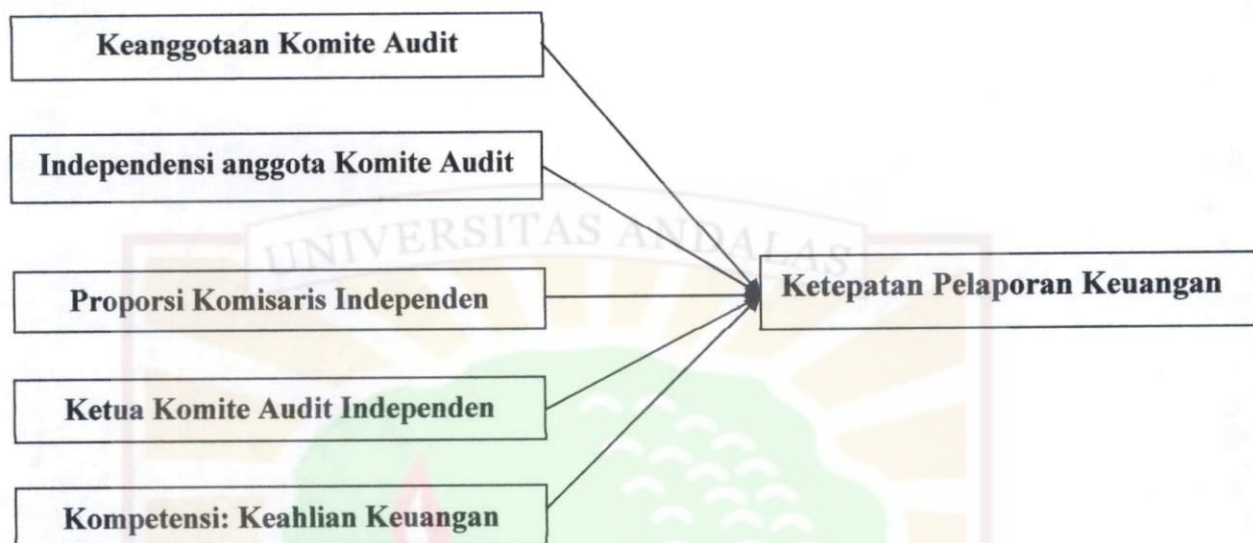
2.5.2 Independensi Komite Audit

Peraturan Kep.Direksi BEJ No.339 tahun 2001 tentang ketentuan umum pencatatan efek bersifat ekuitas menyebutkan bahwa anggota Komite Audit sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga independensi dari Komite Audit itu sendiri. Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (2001) juga mensyaratkan bahwa Komite Audit beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris, ini berarti bahwa syarat minimal adalah dua anggota Komite Audit yang berfungsi sebagai ketua dan anggota Komite Audit. Pada Desember 1999, *New York Stock Exchange* (NYSE) dan NASDAQ memperbaharui persyaratan Komite Audit bagi perusahaan yang terdaftar di bursa saham.

Dalam Peraturan Kep.Direksi BEJ No.339 tahun 2001 tentang ketentuan umum pencatatan efek bersifat ekuitas, perusahaan harus memiliki Komite Audit sedikitnya 3 anggota, dimana semua anggota tidak boleh memiliki hubungan dengan perusahaan karena akan mengganggu independensi mereka dari manajemen dan perusahaan. Peraturan baru ini sebagai respon atas permintaan *Stock Exchange Committe* (SEC) untuk meningkatkan efektivitas Komite Audit

GAMBAR 2.1

Kerangka pemikiran teoritis pengaruh karakteristik komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan publik yang tercatat di BEI



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Prosedur pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purpose sampling* berdasarkan pertimbangan (*judgment sampling*). Yaitu sampel yang dipilih dari sejumlah populasi yang dianggap dapat mewakili. Pertimbangan yang digunakan dalam pemilihan sampel penelitian antara lain: memiliki data mengenai keanggotaan Komite Audit, independensi, proporsi Komisaris Independen, ketua Komite Audit dan kompetensi komite audit .

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Jenis data

Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (1999) data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Adapun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi: Data diskripsi komite audit, yang terdiri dari keberadaan, ukuran, independensi, kompetensi dan ukuran komisaris independen dari perusahaan-perusahaan manufaktur yang *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2010.

3.2.2 Sumber data

Data mengenai emiten yang dikenai sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan pasar modal selama tahun 2008-2010 diperoleh dari laporan bagian penetaan sanksi, biro perundang-undangan dan bantuan hukum, Bapepam tahun 2008-2010. Data mengenai nama-nama emiten yang telah membentuk Komite Audit dan mengangkat Komisaris Independen diperoleh dari pengumuman BEJ No. Peng-123/BEJ-PSR/10-2003.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.1. Variabel penelitian dan indikator penelitian

Variabel Penelitian	Indikator Pengukuran	Keterangan
Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan	Dikategorikan terlambat jika laporan keuangan dilaporkan setelah tanggal 31 Maret. Dikategorikan tepat waktu adalah perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan sebelum tanggal 31 Maret.	Dimana kategori 0 (nol) untuk perusahaan yang tidak tepat waktu dan kategori 1 (satu) untuk perusahaan yang tepat waktu
Keanggotaan Komite Audit	Jumlah anggota Komite Audit yang dibentuk perusahaan.	Persyaratan minimal 3, dan boleh lebih dari 3
Independensi Komite Audit	Proporsi jumlah anggota yang berasal dari luar Emiten dengan jumlah anggota Komite Audit	Dalam persen (%)
Proporsi Komisaris Independen	Proporsi anggota Komisaris Independen dengan jumlah total Dewan Komisaris.	Dalam persen (%)
Ketua Komite Audit Independen	Diproksi dari komisaris independen sebagai ketua Komite Audit Independen.	Variabel ini dinilai 1 (satu), jika ketua Komite Audit orang dari luar perusahaan yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan direksi dan komisaris perusahaan. Dan dinilai 0 (nol) jika sebaliknya
Kompetensi	Proporsi anggota Komite Audit yang kompeten yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan dari jumlah anggota Komite Audit	Dalam persen (%)

Variabel penelitian dan definisi operasional variabel dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

3.3.1 Ketepatan waktu

Pengukuran ketepatan waktu pelaporan keuangan diukur berdasarkan keterlambatan pelaporan keuangan perusahaan, yang didasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Bapepam berdasarkan UU No.8 tahun 1985 yang telah diperbaharui dengan peraturan No. Kep-38/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996. Berdasarkan keputusan Ketua Bapepam No. Kep-38/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selambat-lambatnya akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan untuk tahun 2008. Perusahaan dikategorikan terlambat jika laporan keuangan dilaporkan setelah tanggal 31 Maret, sedangkan perusahaan yang tepat waktu adalah perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan sebelum tanggal 31 Maret. Dimana kategori 0 (nol) untuk perusahaan yang tidak tepat waktu dan kategori 1 (satu) untuk perusahaan yang tepat waktu.

Namun, semenjak 7 Desember 2006 peraturan tersebut diperbarui dengan peraturan X.K.2 No. Kep-134/BL/2006 yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif selambat-lambatnya empat (empat) bulan setelah tanggal laporan keuangan tahunan untuk tahun 2009 dan 2010. Perusahaan dikategorikan terlambat jika laporan keuangan dilaporkan setelah tanggal 31 April, sedangkan perusahaan yang tepat waktu adalah perusahaan yang menyampaikan laporan

keuangan sebelum tanggal 31 April. Dimana kategori 0 (nol) untuk perusahaan yang tidak tepat waktu dan kategori 1 (satu) untuk perusahaan yang tepat waktu.

3.3.2 Keanggotaan Komite Audit

Keanggotaan Komite Audit dalam suatu perusahaan didefinisikan sebagai jumlah anggota komite audit. Di Indonesia, keanggotaan komite audit bermacam-macam, namun sebagai panduan, Bapepam (1999) dan Bursa Efek Jakarta (2001) mengatur bahwa anggota komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang.

Pada Desember 1999, *New York Stock Exchange* (NYSE) dan NASDAQ memperbaharui persyaratan Komite Audit bagi perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Dalam standar yang baru, perusahaan harus memiliki komite audit sedikitnya 3 anggota, dimana semua anggota tidak boleh memiliki hubungan dengan perusahaan karena akan mengganggu independensi mereka dari manajemen dan perusahaan. Peraturan baru ini sebagai respon atas permintaan *Stock Exchange Committe* (SEC) untuk meningkatkan efektivitas Komite Audit dalam menilai proses pelaporan keuangan. Hal tersebut sejalan dengan Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG,2002) yang mensyaratkan bahwa Komite Audit beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris yang berarti mensyaratkan minimal dua anggota Komite Audit yang berfungsi sebagai ketua dan anggota Komite Audit. Keanggotaan Komite Audit diukur dari jumlah anggota Komite Audit yang dibentuk perusahaan.

3.3.3 Independensi anggota Komite Audit

Independensi adalah suatu sikap mental yang sulit dikendalikan karena berhubungan dengan integritas seseorang. Integritas seseorang ditentukan oleh

apa yang sebenarnya diyakini dan dilaksanakan dalam kenyataan (*in fact*) bukan hanya apa yang terlihat (*in appearance*) (FGCI,2000). Independensi anggota Komite Audit sejalan dengan Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG,2002) yang mensyaratkan minimal dua anggota Komite Audit yang berfungsi sebagai ketua dan anggota Komite Audit. Di Indonesia, keanggotaan komite audit bermacam-macam, namun sebagai panduan, Bapepam (1999) dan Bursa Efek Jakarta (2001) mengatur bahwa anggota komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang.

Variabel ini diukur dari proporsi jumlah anggota yang berasal dari luar Emiten dengan jumlah anggota Komite Audit. Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan serta surat pengangkatan komisaris independen dan Komite Audit serta Direktori Pasar Modal Indonesia.

3.3.4 Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen memiliki kriteria sebagai berikut (FCGI, 2003):

1. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) perusahaan tercatat yang bersangkutan;
2. Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;
3. Komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
4. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (*bukan*

controlling shareholders) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) komisaris lainnya Perusahaan Tercatat yang bersangkutan.

Peraturan BEJ Kep.Direksi BEJ No.339 tahun 2001 menyatakan bahwa perusahaan yang mencatatkan diri di bursa saham harus mempunyai Komisaris Independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas (bukan *controlling shareholders*). Dalam peraturan ini, jumlah persyaratan minimal adalah 30 % dari seluruh Dewan Komisaris. Proporsi Komisaris Independen diukur dari anggota Komisaris Independen dengan jumlah total Dewan Komisaris.

3.3.5 Ketua Komite Audit

Ketua Komite Audit (FICG:2003) adalah anggota Komite Audit yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

Variabel ketua Komite Audit diproksi dari komisaris independen sebagai ketua Komite Audit. Variabel ini dinilai 1 (satu), jika ketua Komite Audit orang dari luar perusahaan yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan direksi dan komisaris perusahaan. Dan dinilai 0 (nol) jika sebaliknya.

3.3.6 Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan harus yang dimiliki mengenai pemahaman yang memadai tentang akuntansi, audit dan sistem yang berlaku dalam perusahaan. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman.

Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota Komite Audit untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. *The Indonesian Institute For Corporate Governance* (2000) memuat ketentuan bahwa anggota Komite Audit harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai akuntansi, audit dan sistem yang berlaku dalam perusahaan. Disamping itu, anggota Komite Audit juga harus memiliki atribut-atribut untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, yaitu sifat tidak mudah percaya (*suspicious mind*), dan memiliki rasa ingin tahu (*inquisitive mind*), dapat berpikir logis (*logical mind*) dan memiliki kemampuan untuk menganalisa masalah (*analytical ability*). Peraturan Bepepam mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit mensyaratkan bahwa salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Variabel ini diukur dari proporsi anggota Komite Audit yang kompeten yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan dari jumlah anggota Komite Audit.

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal. Dipilihnya BEI sebagai lokasi penelitian dikarenakan BEI merupakan pasar modal terbesar di Indonesia, sedangkan Bapepam badan/lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengawasi aktivitas pasar modal di Indonesia. Periode penelitian pada tahun 2008-2010.

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara:

1. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data sekunder yang diperlukan.
2. Penelitian kepustakaan, yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mempelajari literatur dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Regresi logistik digunakan dalam penelitian ini karena variabel bebasnya kombinasi antara metrik dan nominal (non metrik) (Imam Ghozali, 2001). Regresi logistik digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel keanggotaan Komite Audit (ANGGOTA), independensi anggota Komite Audit (INDEP), proporsi Komisaris Independen (KI), ketua Komite Audit (KKA) dan kompetensi (KOMPT) mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Dalam analisis penelitian ini tidak melakukan uji normalitas data karena menurut Ghozali (2001) *logistic regression* tidak memerlukan asumsi normalitas pada variabel bebasnya. Asumsi *multivariate normal distribution* tidak dapat dipenuhi karena variabel bebasnya merupakan campuran antara kontinyu (metrik) dan kategorikal (non-metrik) (Hair,2000).

Menurut Mudrajat Kuncoro (2001) regresi logistik tidak memiliki asumsi normalitas atas variabel bebas yang digunakan dalam model. Artinya, variabel penjelasnya tidak harus memiliki distribusi normal, linear maupun memiliki varian yang sama dalam setiap grup. Gujarati (2003) menyatakan regresi logistik

juga mengabaikan masalah *heteroscedacity*. Artinya variabel dependen tidak memerlukan *homoscedacity* untuk masing-masing variabel independennya.

Model regresi logistik yang digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut:

$$\frac{TL}{1-TL} = \beta_0 + \beta_1 \text{ ANGGOTA} + \beta_2 \text{ INDEP} + \beta_3 \text{ KI} + \beta_4 \text{ KKA} + \beta_5 \text{ KOMPT} + \epsilon.$$

$$\frac{TL}{1-TL} = \text{Dummy variabel ketepatan waktu pelaporan.}$$

ANGGOTA = Keanggotaan Komite Audit

INDEP = Independensi anggota Komite Audit.

KI = Proporsi Komisaris Independen

KKA = Ketua Komite Audit.

KOMPT = Kompetensi

ϵ = Error

Analisis pengujian dengan regresi logistik menurut Singgih Santoso (2009) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menilai kelayakan model regresi

Perhatikan output dari Hosmer dan Lemeshow, dengan hipotesis:

Ho: Tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.

Hi: Ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.

Dasar pengambilan keputusan:

Perhatikan nilai *goodness of fit test* yang diukur dengan *Chi-Square* pada bagian bawah uji Hosmer dan Lemeshow:

- Jika probabilitas $> 0,05$ Ho diterima.
- Jika probabilitas $< 0,05$ Ho ditolak

2. Menilai keseluruhan model (*overall model fit*)

Perhatikan angka -2 Log Likelihood (LL) pada awal (Blok Number = 0) dan angka -2 Log Likelihood pada Blok Number = 1. Jika terjadi penurunan angka -2 Log Likelihood (Blok Number 0 – Blok Number 1) menunjukkan model regresi yang baik. Log Likelihood pada regresi logistik mirip dengan pengertian "*sum squared error*" pada model regresi, sehingga penurunan Log Likelihood menunjukkan model regresi yang baik (Ghozali, 2005).

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menunjukkan variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Koefisien ini ditunjukkan oleh nilai *Nagelkerke R Square*, nilai ini dapat diinterpretasikan sebagai nilai R Square pada regresi ini (Ghozali, 2005).

4. Menguji Koefisien regresi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam uji koefisien regresi adalah:

1. Tingkat signifikansi (α) yang digunakan sebesar 10%. Mason (1999) menyebutkan bahwa tidak terdapat satu level signifikan yang diaplikasikan untuk semua pengujian. Pada umumnya level 5% (0,05) untuk riset konsumen, level 1% (0,01) untuk *quality insurance* dan level 10% untuk *political polling*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil deskripsi data, statistik deskriptif, uji multikolinearitas, uji kesesuaian tanda dan uji regresi logistik.

4.1.1 Deskripsi Data

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menguji apakah keanggotaan Komite Audit mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang listing di BEI; (2) menguji apakah independensi anggota Komite Audit mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang listing di BEI; (3) menguji apakah proporsi Komisaris Independen mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang listing di BEI; (4) menguji apakah ketua Komite Audit mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang listing di BEI; (5) menguji apakah kompetensi anggota Komite Audit mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang listing di BEI. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan populasi perusahaan-perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berjumlah 150 perusahaan. Dengan begitu, berdasarkan kriteria diperoleh sampel sebanyak 52 perusahaan manufaktur yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

Tabel 4.1

Proses Seleksi Sampel Berdasarkan kriteria

No	Kriteria	Jumlah (perusahaan)
1	Total perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI antara tahun 2008-2010	150
2	Delisting selama periode pengamatan	7
3	Data yang diungkapkan dalam <i>annual report</i> tidak memenuhi kriteria variabel penelitian	91
	Jumlah sampel perusahaan selama periode penelitian	52
	Jumlah sampel antara tahun 2008-2010 (52 perusahaan x 3 tahun)	156

4.1.2 Hasil Statistik Deskriptif

Sebelum melakukan pengujian multikolinearitas dan pengujian regresi logistik terlebih dahulu disajikan statistik deskriptif yang dapat dilihat dalam Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Keanggotaan Komite Audit	156	2.00	5.00	3.1410	.43178
Independensi Anggota Komite	156	50.00	100.00	98.7244	7.19011
Proporsi Komisaris Independen	156	14.00	75.00	40.7244	10.35348
Ketua Komite Audit	156	.00	1.00	.9679	.17670
Kompetensi: Keahlian Keuangan	156	25.00	100.00	63.5769	19.27192
Ketepatan Pelaporan Keuangan	156	.00	1.00	.8462	.36196
Valid N (listwise)	156				

Sumber: Data Sekunder diolah

Tabel 4.1 menunjukkan statistik deskriptif yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Dari keseluruhan 156 sampel (52 perusahaan dengan masing-masing data 3 tahun, $52 \times 3 = 156$) yang digunakan tampak bahwa rata-rata memiliki nilai anggota komite audit sebesar 3,1410, dengan standar deviasi sebesar 0,43178 dengan nilai maksimum adalah 5 dan minimum adalah 2. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai besar perusahaan di Indonesia yang telah membentuk komite audit mempunyai jumlah anggota yang memenuhi persyaratan minimal 3 orang.

Variabel independensi anggota komite audit menunjukkan rata-rata sebesar 98,7244, dengan standar deviasi sebesar 7,19011 dengan nilai maksimum adalah 100 dan minimum adalah 50. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai besar perusahaan di Indonesia anggota komite audit dalam struktur dewan komisaris adalah berasal dari luar emiten sehingga independen.

Variabel proporsi komisaris independen menunjukkan rata-rata sebesar 40,7244, dengan standar deviasi sebesar 10,35348 dengan nilai maksimum adalah 75 dan minimum adalah 14. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai besar perusahaan di Indonesia telah memiliki komisaris independen sesuai dengan peraturan BEJ, dimana proporsi komisaris independen minimal adalah 30% dari seluruh Dewan Komisaris.

Variabel ketua komite audit menunjukkan rata-rata sebesar 0,9679, dengan standar deviasi sebesar 0,17670 dengan nilai maksimum adalah 1 dan minimum adalah 0. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai besar ketua

komite audit perusahaan di Indonesia merupakan komisaris independen yang bertindak sebagai ketua komite audit.

Variabel kompetensi keahlian keuangan menunjukkan rata-rata sebesar 63,5769, dengan standar deviasi sebesar 19,27192 dengan nilai maksimum adalah 100 dan minimum adalah 25. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai besar anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan pada perusahaan di Indonesia sebesar 63%.

4.1.3 Hasil Deskriptif untuk Masing-Masing Variabel

Berikut ini akan dijelaskan gambaran dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Ketepatan Pelaporan Keuangan * Keanggotaan Komite Audit Crosstabulation

Count

		Keanggotaan Komite Audit				Total
		2 orang	3 orang	4 orang	5 orang	
Ketepatan Pelaporan Keuangan	Tidak Tepat Waktu	0	20	4	0	24
	Tepat Waktu	2	113	14	3	132
Total		2	133	18	3	156

Sumber: Data Sekunder diolah

Dari Tabel 4.2 di atas, terlihat bahwa perusahaan yang tepat waktu dengan jumlah anggota 2 orang adalah 2 data, dengan anggota 3 orang adalah 113 data, dengan anggota 4 orang adalah 14 data, dan dengan anggota 5 orang adalah sebanyak 3 data. Sedangkan perusahaan yang tidak tepat waktu pelaporannya, dengan keanggotaan komite audit 3 orang adalah 20 data, dengan anggota 4 orang adalah 4 data.

Tabel 4.4**tepatan Pelaporan Keuangan * Independensi Anggota Komite Audit Crosstabulati**

Count

	Independensi Anggota Komite Audi			Total
	50 %	67 %	100 %	
Ketepatan Pelaporan Tidak Tepat Waktu	0	1	23	24
Keuangan Tepat Waktu	2	2	128	132
Total	2	3	151	156

Sumber: Data Sekunder diolah

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, terlihat bahwa perusahaan yang tepat waktu dalam pelaporan keuangan dengan tingkat independensi anggota komite audit 50% adalah sebanyak 2 data, 67% sebanyak 2 data, dan 100% sebanyak 128 data. Sedangkan tidak tepat waktu dengan tingkat independensi anggota komite audit 67% sebanyak 1 data, dan 100% sebanyak 23 data.

Tabel 4.5**Ketepatan Pelaporan Keuangan * Proporsi Komisaris Independen Crosstabulation**

Count

	Proporsi Komisaris Independen													Total
	14%	25%	30%	33%	38%	40%	43%	45%	50%	57%	60%	67%	75%	
Ketepatan Tidak Tepat Waktu	0	0	0	13	2	3	2	0	3	0	1	0	0	24
Keuangan Tepat Waktu	1	3	4	52	4	16	8	1	31	1	6	2	3	132
Total	1	3	4	65	6	19	10	1	34	1	7	2	3	156

Sumber: Data Sekunder diolah

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, terlihat bahwa perusahaan yang tepat waktu dalam pelaporan keuangan memiliki Komisaris Independen dengan proporsi 14% adalah 1 data, 25% adalah 3 data, 30% adalah 4 data, 33% adalah 52 data, 38% adalah 4 data, 40% adalah 16 data, 43% adalah 8 data, 45% adalah 1 data, 50% adalah 31 data, 57% adalah 1 data, 60% adalah 6 data, 67% adalah 2 data, dan 75% adalah 3 data. Sedangkan

perusahaan yang tidak tepat waktu dalam pelaporan keuangan yang paling banyak adalah 13 data dengan proporsi 33%.

Tabel 4.6

Ketepatan Pelaporan Keuangan * Ketua Komite Audit Crosstabulation

Count		Ketua Komite Audit		Total
		K. Audit dlm perusahaan	K. Audit di Luar Perusahaan	
Ketepatan Pelaporan Keuangan	Tidak Tepat Waktu	1	23	24
	Tepat Waktu	4	128	132
Total		5	151	156

Sumber: Data Sekunder diolah

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, terlihat bahwa perusahaan yang tepat waktu dalam pelaporan keuangan, memiliki ketua komite audit yang berasal dari dalam perusahaan ada 4 data dan komite audit di luar perusahaan ada 128 data. Sedangkan tidak tepat waktu pelaporan keuangannya ada 1 data komite audit dalam perusahaan dan 23 data komite audit di luar perusahaan.

Tabel 4.7

Ketepatan Pelaporan Keuangan * Kompetensi: Keahlian Keuangan Crosstabulation

Count		Kompetensi: Keahlian Keuangan							Total
		25%	33%	50%	60%	67%	75%	100%	
Ketepatan Pelaporan Keuangan	Tidak Tepat Waktu	2	6	2	0	14	0	0	24
	Tepat Waktu	2	20	5	3	76	8	18	132
Total		4	26	7	3	90	8	18	156

Sumber: Data Sekunder diolah

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, terlihat bahwa pelaporan keuangan tepat waktu dengan kompetensi keahlian keuangan 25% adalah 2 data, 33% adalah 20 data, 50% adalah 5 data, 60% adalah 3 data, 67% adalah 76 data, 75% adalah 8 data, 100% adalah 18 data. Sedangkan tidak tepat

waktu dengan kompetensi keahlian keuangan 25% adalah 2 data, 33% adalah 6 data, 50% adalah 2 data, 67% adalah 14 data.

4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan

4.2.1 Persyaratan Analisis

Bertujuan untuk mengetahui hubungan yang bermakna antara masing-masing variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Menurut Setawan (2010) pedoman suatu model regresi bebas dari multikolinieritas adalah:

- Mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 samai 10
- Mempunyai angka *tolerance* mendekati 1.

Melalui program komputer SPSS V.15 dengan menggunakan model matrix korelasi dapat dilihat hubungan dari masing-masing variabel, seperti terlihat pada Tabel 4.7 matrix korelasi:

Tabel 4.8
Matrik Koefisien Korelasi
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Keanggotaan Komite Audit	.938	1.066
Independensi Anggota Komite Audit	.704	1.541
Proporsi Komisaris Independen	.981	1.019
Ketua Komite Audit	.743	1.280
Kompetensi: Keahlian Keuangan	.948	1.054

a. Dependent Variable: Ketepatan Pelaporan Keuangan

Sumber: Data Sekunder diolah

Dari hasil analisis data yang terlihat pada Tabel 4.7 ternyata tidak terdapat hubungan yang berarti antara sesama variabel bebas (ANGGOTA, INDEP, KI, KKA, KOMPT) sebab nilai tolerance dari masing-masing

variabel bebas mendekati angka 1 dan VIP lebih besar dari satu dan lebih kecil dari angka 5. Hal ini membuktikan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antara sesama variabel bebas. Oleh sebab itu kedua variabel bebas memenuhi persyaratan untuk dianalisis dengan memakai regresi.

4.2.2 Hasil Analisis Regresi Logistik

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik, perlu dilakukan uji kelayakan model regresi dan uji koefisien regresi sehingga didapat:

1) Menilai Kelayakan Model Regresi

Tabel 4.9

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	6.085	7	.530

Sumber: Data Sekunder diolah

Nilai *goodness of fit test* yang diukur dengan nilai *Chi-Square* pada bagian bawah uji *Hosmes and Lemeshow* menunjukkan angka probabilitas 0,530 > 0,05, artinya model regresi logistik yang digunakan cukup baik menggambarkan hubungan antara karakteristik Komite Audit dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan publik yang tercatat di BEI. Hal ini berarti model regresi logistik layak dipakai untuk analisis selanjutnya.

2) Menilai keseluruhan model (Overall model fit)

Setelah menilai kelayakan model regresi yang digunakan, maka langkah selanjutnya adalah menilai keseluruhan model (*overall model fit*) dengan melihat angka -2 Log Likelihood (LL) pada awal (Blok Number = 0) dan angka -2 Log Likelihood pada Blok Number = 1. Dari pengolahan

data dihasilkan nilai -2 Log Likelihood (LL) pada awal (Blok Number = 0) sebesar 147,526 dan pada Blok Number = 1 sebesar 122,616. Dengan demikian terjadi penurunan angka -2 Log Likelihood sebesar 24,91 yang menunjukkan model regresi baik/fit.

Tabel 4.10 dan 4.11

Perbandingan -2 Log Likelihood awal dengan akhir

Block 0 : Beginning Block

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Coefficients Constant
0	147.526	-1.189

- a. Constant is included in the model
- b. Initial -2 Log likelihood: 147.526

Block 1 : Method =

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	122.616 ^a	.070	.122

- a. Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached. Final solution cannot be found.

3) Menguji Koefisien Regresi

Dengan uji t terlihat bahwa hanya konstanta, Keanggotaan Komite Audit, Independensi Anggota Audit, Proporsi Komisaris Independen, Ketua Komite Audit, dan Kompetensi Keahlian Keuangan yang signifikan secara statistik (Sig. Konstanta = 0,999, Keahlian Keuangan = 0,005. Sedangkan variabel lainnya yaitu Keanggotaan Komite Audit, Independensi Anggota Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Ketua Komite Audit angka

signifikannya $> 0,05$. Menurut Agung (2001) jika variabel-variabel mempunyai nilai yang lebih besar dari taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$), maka variabel-variabel tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan, sehingga model logistik dapat disederhanakan dengan tidak memakai variabel-variabel yang tidak signifikan tersebut. Setelah dilakukan pengolahan ulang, diperoleh hasil sebagai berikut:

Dari hasil pengolahan tersebut dapat ditabelkan seperti pada Tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12. Hasil Uji Analisis Regresi Logistik

Variabel	B	S.E.	Wald	df	Sig	Exp (B)
Keanggotaan Komite Audit	0,052	0,567	0,008	1	0,927	1,053
Independensi Anggota Audit	-1,242	1598,247	0,000	1	0,999	0,289
Proporsi Komisaris Independen	0,035	0,026	1,783	1	0,182	1,036
Ketua Komite Audit	42,074	52742,2	0,000	1	0,999	1,873E+018
Kompetensi Keahlian Keuangan	0,035	0,012	7,801	1	0,005	1,035
Constant	80,236	107083	0,000	1	0,999	7,012E+034
X^2 (Chi Square) = 6,085 df = 7 $R^2 = 0,122$						

Sumber: Data Sekunder diolah

Persamaan regresi logistik berdasarkan Tabel 4.9 di atas adalah:

$$Y = 80,236 + 0,052 \text{ ANGGOTA} - 1,242 \text{ INDEP} + 0,035 \text{ KI} + 42,074 \text{ KKA} + 0,035 \text{ KOMPT} + \epsilon$$

Konstanta sebesar 80,236 menunjukkan bahwa tanpa adanya Keanggotaan Komite Audit, Independensi Anggota Audit, Proporsi Komisaris Independen, Ketua Komite Audit, dan Kompetensi Keahlian Keuangan yang mempengaruhi ketepatan pelaporan keuangan ada sebesar 80,236.

4) Uji Koefisien Determinansi (R^2)

Uji R^2 (koefisien determinasi) untuk menunjukkan berapa besar proporsi variabel bebas (Keanggotaan Komite Audit, Independensi Anggota Audit, Proporsi Komisaris Independen, Ketua Komite Audit, dan Kompetensi Keahlian Keuangan) mampu menjelaskan variabel terikat (Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan). Hasil regresi logistik dengan nilai R^2 (koefisien determinasi) sebesar 0,122, yang berarti bahwa 12,20% variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas (Keanggotaan Komite Audit, Independensi Anggota Audit, Proporsi Komisaris Independen, Ketua Komite Audit, dan Kompetensi Keahlian Keuangan). Sedangkan 87,80% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak masuk dalam variabel penelitian ini.

4.2.3 Pembahasan

Berdasarkan Tabel 4.12. dapat dilihat dari 5 (lima) variabel yang diteliti, hanya 1 variabel yaitu kompetensi keahlian keuangan yang memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, hal ini dikarenakan nilai signifikansinya lebih kecil dari alpha 0,05.

1. Pengaruh Keanggotaan Komite Audit signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang listing di BEI

Dari persamaan regresi logistik diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Keanggotaan Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. Ini dibuktikan dengan nilai sig. $0,927 > \alpha 0,05$. Dari hasil ini berarti H_1 ditolak H_0 diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Keanggotaan Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.

Belum adanya pengaruh antara keanggotaan komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang listing di BEI disebabkan komite audit belum secara maksimal melaksanakan fungsinya sehingga jumlah anggota yang besar tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Hasil ini sejalan dengan pendapat Vincentus Anthony dalam Media Akuntansi yang tidak yakin komite audit efektif dalam menjalankan fungsinya. Dikatakan bahwa semasa komite audit masih mendapat manfaat/benefit dari perusahaan, independensinya sulit diwujudkan.

2. Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang listing di BEI.

Dari persamaan regresi logistik diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh Independensi Komite Audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang listing di BEI. Ini dibuktikan dengan nilai sig. $0,999 > \alpha 0,05$. Dari hasil ini berarti H_2 ditolak H_0 diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Independensi Anggota Audit terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.

Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Independensi Anggota Audit terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan perusahaan publik yang listing di BEI, hal ini disebabkan tingkat independensi komite audit masih diragukan. Hasil ini sejalan dengan pendapat Herwidayatno (2000) dalam artikel FCGI tentang peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam *corporate governance* yang menyatakan bahwa independensi Dewan Komisaris dan komite

Audit di Indonesia sangat diragukan mengingat posisi anggota dewan Komisaris diberikan sebagai rasa penghargaan semata maupun berdasarkan hubungan kekeluargaan.

3. Pengaruh Proporsi komisaris independen terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang listing di BEI

Dari persamaan regresi logistik diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh Proporsi komisaris independen terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang listing di BEI. Ini dibuktikan dengan nilai sig. $0,182 > \alpha 0,05$. Dari hasil ini berarti H_3 ditolak H_0 diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Proporsi Komisaris Independen terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.

Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Proporsi Komisaris Independen terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan perusahaan publik yang listing di BEI, hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen belum mampu melaksanakan fungsinya sebagai salah satu *corporate governance* secara maksimal dan posisi komisaris independen masih sebatas untuk mematuhi regulasi yang ditetapkan Bapepam. Bradbury (1990) menyatakan bahwa Komite Audit dibentuk lebih untuk tujuan kosmetik semata dan bukan untuk meningkatkan pengendalian pemegang saham atas pihak manajemen. Hasil ini bertentangan dengan penelitian Scarbrough dkk (1998) dimana diungkapkan bahwa komite audit di Kanada yang beranggotakan komisaris independen (*non employee directors*) berkecenderungan bekerja lebih efektif.

4. Pengaruh Ketua Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang listing di BEI

Dari persamaan regresi logistik diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Ketua Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. Ini dibuktikan dengan nilai sig. 0,999 > alpha 0,05. Dari hasil ini berarti H_4 ditolak H_0 diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Ketua Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.

Ini disebabkan posisi anggota Dewan Komisaris Independen sekaligus Ketua Komite Audit Independen diberikan sebagai rasa penghargaan semata maupun berdasarkan hubungan kekeluargaan atau kenalan dekat (Herwidayatmo, 2000). Hal ini juga disebabkan karena ketua komite audit tidak memiliki kemampuan komunikasi dan kepemimpinan yang bagus dan efektif sesuai dengan *best practice* yang dikeluarkan oleh FCGI (2003). Dalam memilih ketua komite audit, dewan komisaris harus memilih seseorang yang mempunyai kualitas kepemimpinan kuat dan kemampuan untuk menciptakan hubungan kerja yang efektif (baik antar anggota komite dan dengan pihak lain seperti pihak manajemen, auditor internal dan auditor eksternal) (PricewaterhouseCoopers, 1999).

5. Pengaruh Keahlian keuangan dalam struktur Komite Audit signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang listing di BEI

Dari persamaan regresi logistik diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara keahlian keuangan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. Ini dibuktikan dengan nilai sig. $0,005 < \alpha 0,05$. Dari hasil ini berarti H_0 ditolak H_5 diterima. Artinya semakin baik kompetensi keahlian keuangan maka ketepatan waktu pelaporan keuangan semakin baik.

Hal ini sesuai dengan rekomendasi BRC yang membuktikan bahwa Komite Audit yang memiliki Certified Public Accountant (CPA), pernah menjadi anggota komite audit, atau memiliki pengetahuan yang bagus tentang auditing dan keuangan, berpengaruh secara positif terhadap lingkungan yang akan dihadapi. Penelitian yang dilakukan Kalbers dan Forgarty (1993) menemukan dua variabel utama yang menentukan keberhasilan komite audit, yaitu kewenangan yang secara statute diberikan kepada komite dan keahlian yang dimiliki dan kemauan menggunakan kompetensi oleh para anggota komite.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penelitian

Penelitian ini menguji pengaruh karakteristik Komite Audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan publik yang tercatat di BEI. Karakteristik Komite Audit yang digunakan sebagai variabel independen dalam pengujian ini meliputi keanggotaan Komite Audit, independensi anggota Komite Audit, proporsi Komisaris Independen, ketua Komite Audit dan kompetensi dalam struktur Komite Audit. Penelitian ini menggunakan sampel 52 perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2008-2010. Penelitian ini memperoleh hasil sebagai berikut:

1. Variabel keanggotaan Komite Audit memiliki koefisien bertanda positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,927. Dengan demikian, meskipun pengaruhnya tidak signifikan, semakin besar keanggotaan Komite Audit, maka pelaporan keuangan akan semakin tepat waktu. Hal ini mungkin disebabkan Komite Audit belum secara maksimal melaksanakan fungsinya sehingga keanggotaan yang besar justru akan menurunkan kinerja Komite Audit.
2. Variabel independen anggota Komite Audit menunjukkan nilai koefisien yang positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,999. Dengan demikian, meskipun pengaruhnya tidak signifikan semakin independen anggota Komite Audit, perusahaan semakin tepat waktu dalam pelaporan keuangan.

3. Variabel Komisaris Independen menunjukkan nilai koefisien yang negatif dengan nilai signifikansi sebesar 0,182. Hal ini berarti bahwa semakin besar jumlah Komisaris Independen di suatu perusahaan, semakin tidak tepat waktu dalam pelaporan keuangan. Ini menunjukkan bahwa Komisaris Independen belum mampu berfungsi sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* secara maksimal dan posisi Komisaris Independen masih sebatas untuk mematuhi regulasi yang ditetapkan Bapepam.
4. Variabel ketua Komite Audit menunjukkan pengaruh yang positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,999. Dengan demikian menunjukkan bahwa ketua Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.
5. Variabel keberadaan *financial expert* menunjukkan pengaruh yang positif dengan nilai signifikan sebesar 0,005. Dengan demikian keberadaan keahlian keuangan (*financial expert*) yang dimiliki oleh anggota Komite Audit mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.

5.2 Implikasi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi atas kebijakan BEI yang mewajibkan pembentukan Komite Audit.
2. Bagi pemerintah atau Bapepam sebagai bahan evaluasi bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan mencerminkan keefektifan regulasi, khususnya regulasi tentang penyampaian laporan keuangan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu :

1. Jumlah variabel independen yang digunakan masih sangat terbatas, ini dikarenakan sedikitnya informasi tentang Komite Audit yang diungkapkan ke publik. Hal ini menjelaskan bahwa transparansi dalam pengungkapan praktek *good corporate governance* masih kurang.
2. Peraturan tentang Komite Audit baru ditetapkan pada Tahun 2001 belum cukup untuk dijadikan parameter efektivitas pelaksanaan *corporate governance*. Pengangkatan Komite Audit masih sekedar mematuhi regulasi yang ditetapkan tanpa memperhatikan fungsi yang sesungguhnya.
3. Dalam penelitian ini tidak mempertimbangkan proses kerja yang dilakukan Komite Audit dan Komisaris Independen.

5.3. Saran

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar:

1. Perlu ditambahkan variabel independen yang lain antara lain proses kerja dari Komite Audit dan Komisaris Independen, frekuensi pertemuan yang dilakukan oleh Komite Audit dan auditor independen dalam penentuan ketepatan waktu pelaporan.
2. Perlu diadakan penelitian selanjutnya yang menguji tentang kinerja Komite Audit (*audit committee assessment*) dan pengungkapan (*disclosure*) kinerja tersebut sehingga dapat diketahui bahwa Komite Audit telah menjalankan fungsinya sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* secara benar.
3. Memperbanyak sampel penelitian dan lama tahun penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, K.L., Deli, D.N., dan Gillan, S.T. 2003. "Board of Directors, Audit Committees, and the Information Content of Earnings". Working Papers, September.
- Arens, Beasley, Elder, 2006. *Auditing and Assurance Services*, Twelfth Edition. Prentice Hall
- Arifin, Zaenal. 2003. *Pengaruh corporate Governance terhadap Reaksi Harga dan Volume Perdagangan pada saat pengumuman Earning*, Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya.
- Bapepam, 2000. *Pembentukan Komite Audit*, Surat Edaran Bapepam No. SE.03/PM/2000
- Bapepam, 2004. *Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*, Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004
- Baridwan, Zaki.2000. *Komite Audit Tidak Melakukan Audit*. Auditor Edisi 11/2003. hal 16-17.
- Baysinger, B.D., and H., Butler. 1985. *Corporate Governance and the Board of Director: Performance Effects of Changes in Board Composition*. *Journal of Law, Economic and Organization* 1 (Fall): 101-124.
- Beasley, M.S. 1996. *An Empirical Analysis of The Relation between the Board of Director Composition and Financial Statement Fraud*. *The Accounting Review* 71 (October): 443-465.
- Blue Ribbon Committee (BRC). 1999. *Report and Recommendations of the Blue Ribbon Committee on Improving the Effectiveness of Corporate Audit committee*. New York, N.Y: New York stock Exchange and National Association of Securities Dealers.
- Bradbury, M. E., Mak, Y. T. dan Tan, S. M. 2004. "Board Characteristics, Audit Committee Characteristics and Abnormal Accruals". Working Paper. Unitec New Zealand dan National University of Singapore.
- Bryan, Daniel, M.H. Carol liu and Samuel L. tiras. 2004. *The Influence of Independent and Effective Audit Committee on Earning Quality*, <http://ssrn.com>, January 6.
- Bursa Efek Jakarta, 2001. *Keanggotaan Komite Audit*. Surat Edaran No. SE-008/BEJ/12 2001.

- Bursa Efek Jakarta, 2001. *Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa*, Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) No. Kep-339/BEJ/07/2001.
- Carcello, Joseph.V and Terry L. Neal, 2003. *Audit Committees Characteristics and Auditor dismissals Following "New" Going Concern Reports*. The Accounting Review Vol.78 No.1, January.2003.
- Chambers, Anne E. and Stephen H. enman. 1984. "*The timeliness of Reporting and the stock Price Reaction to earning Announcements*". Journal of Accounting Research. Autumn. Pp. 204-220.
- Chow. C.W., and S.J. Rice., 1982. *Qualified Audit Opinions and Auditor Switching*. The Accounting review 57., April: 326-335.
- Dechow..M.,R.G. Sloan and A..Sweeney, 1995. *Detecting Earning Management*, The Accounting Review 70, 193-226.
- Dechow..M.,R.G. Sloan and A..Sweeney, 1996. "*Causes and Consequenses of Earning Manipulation: An Analysis of firm subject to Enforcement Actions by The SEC,*" Contemporary Accounting Research 13, 1-36.
- Defond, M.L and J, Jiambalvo, 1994. "*Debt Covenant Violation and Manipulation of Accruals,*" Journal of Accounting and Economics, January 17.
- Dyer, J.C.IV and A.J. McHugh. 1975. "*Timeliness of The Australian Annual report*". Journal of Accounting Research. Autumn. Pp. 204-219.
- Fama, Eugene F., and Michael C. Jensen, 1983. *Separation of Ownership an Control*. Journal of Law and Economics 26, 301-325.
- FCGI, 2000. *Corporate Governance (Tata kelola Perusahaan)*. Booklet Jilid I Edisi ke-1.
- FCGI, 2003. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata kelola Perusahaan)*. Booklet Jilid II Edisi ke-2
- Gede, M. (2004). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rentang Waktu Penyajian Laporan Keuangan (Studi Empiris Mengenai Keberadaan Divisi Internal pada perusahaan-perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)*. Makalah Seminar Nasional Akuntansi VII , Denpasar.
- Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 3. Badan penerbit Universitas Dionegoro. Semarang.
- Gudjarati, D, 2003 *Basic Econometrics*. Edisi 3. McGraw-hill: New York.

- Hair, J. et al., 2000. *Multivariate data Analysis*. 6th Edition. Prentice Hall.
- Hendriksen , Eldon S. 2002. *Accounting Theory*. 5th Edition. USA: Ricard D. Irwin Inc.
- Herwidyatmo, 2004. *Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.I.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*. Auditor. 12/2004. hal 17-18
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 1998. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Cetakan ertama. BFE Yogyakarta.
- Ismail, Ku Nor Izah Ku. 2008. *The Timeliness Of Quarterly Financial Reports Of Companies In Malaysia*. Journal of Accounting anf Economics, December 27.
- Jean Bedars, Sonda Marrakchi Chtourou and Lucie Courteau, 2002. *The Effect of Audit Committee Independence, Competence and Activity on Aggressive Earning management*. Universite laval Canada.
- Klien, A. 2000. “*Audit Committee, Board of Director Characteristic, and Earning Management*”. Working Paper New York University, New York.
- Klien, A. 2002. “*Audit Committee, Board of Director Characteristics and Earnings Management*”. Journal Accounting and Economics (33), hal. 375—400.
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, 2002. *Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif*. <http://www.google.com>, 19 Oktober 2011.
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. <http://www.google.com>, 19 Oktober 2011.
- Kuncoro, Mudrajad. 2001. *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi untuk bisnis dan Ekonomi*. Edisi Pertama. Cetakan ertama. Unit Penerbit dan percetakan AMP YKPN. Yogyakarta.
- Mayangsari, Sekar dan Murtanto, 2002. “*Reaksi pasar Modal Indonesia terhadap Pembentukan Komite Audit*”. Proceeding Simosium Surviving Strategies to Cope with the Future, Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- McGee, Robert W.2008. *Corporate Governance And The Timeliness Of Financial Reporting: An Empirical Study Of The People’s Republic Of China*. Accounting journal. May 15.

- New York Stock Exchange, 2002. *NYSE Corporate Accountability and Listing Standard Committee*. Juni 6.
- Owusu-Ansah, S. 2000. "Timeliness of Corporate Financial Reporting in Emerging Capital Market: Empirical Evidence from the Capital Zimbabwe Stock Exchange". *The Accounting and Business Research*. Summer. Pp.241-254.
- Rachmawati, S. (2008). *Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap Audit Delays dan Timeliness*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1-10.
- Resati, Novita Weningtyas. 2001. *Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan: Studi Empiris di Bursa Efek Jakarta*. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Saleh, R. (2004). *Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta*. *Simposium Nasional Akuntansi VII (Desember)*, 897-910.
- Santoso, Singgih. 2009. *Statistik Menjadi Mudah Dengan SPSS 17*. Jakarta, Elex Media Komputindo
- Schwartz, K. and B. Soo. 1996. "Evidence of Regulatory Non-Compliance with SEC Disclosure Rules on Auditor Changes". *The Accounting Review* (4). October. Pp. 555-572.
- Scott, William R., 1997, *Financial Accounting Theory*, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Securities and Exchange Commission (SEC), 2000. *Final Rule: Revision of the Commission's Auditor Independence Requirements*. Reale No. 33-7919. Washington DC: SEC
- Setiawan, Dwi Indah Kusriani, 2010. *Ekonometrika*. Yogyakarta : ANDI
- Sri Purwati, Atiek, 2006. *Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Publik Yang Tercatat Di BEJ*. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Sulistiyanto, H. Sri dan Meniek S.Prapti, 2003. "Good Governance: Antara Idealisme dan Kenyataan", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. FE UAJY.
- Suwardjono. (2005). *Teori Akuntansi : Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.

Tjager, I.N., F.A. Alijoyo, H.R. Djemat, dan B. Sembodo, 2003. *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Pearson Education-Prentice Hall, 2003.

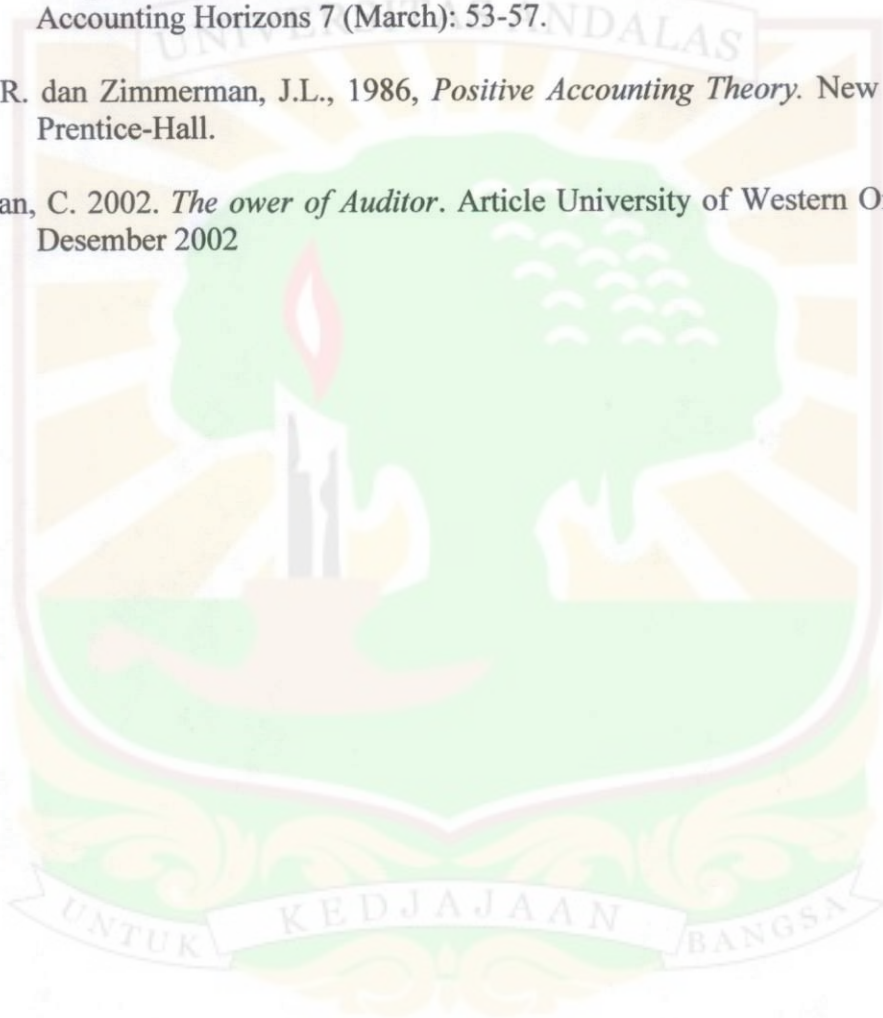
Tugiman, Hiro. 2007. *Sekilas Komite Audit*. Bandung: PT Eresco Anggota IKAPI.

Utami, W. (2006). *Analisis Determinan Audit Delay Kajian Empiris di Bursa Efek Jakarta*. BULETIN penelitian No.009 .

Vicknair. D.,K. Hickman, and K.C. Carnes. 1993. *A Note on Audit Committee Independence: Evidence from the NYSE on "Grey" Area Directors*. Accounting Horizons 7 (March): 53-57.

Watts, R. dan Zimmerman, J.L., 1986, *Positive Accounting Theory*. New York: Prentice-Hall.

Wiedman, C. 2002. *The ower of Auditor*. Article University of Western Ontario. Desember 2002



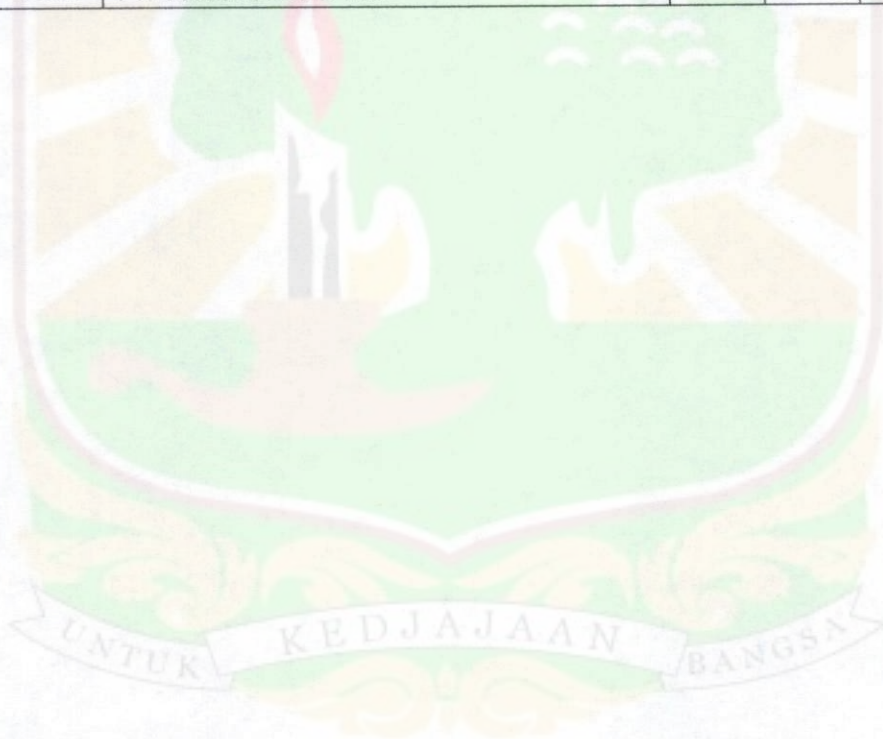
LAMPIRAN 1

Karakteristik Komite Audit

KETEPATAN WAKTU (1 untuk tepat waktu, 0 untuk tidak tepat waktu)

NO	CODE	COMPANY	2008	2009	2010
1	AKRA	PT. AKR Corporindo Tbk	1	1	1
2	AMFG	PT. Asahimas Flat Glass Tbk	1	1	1
3	ARNA	PT. Arwana Citramulia Tbk	1	1	1
4	ASGR	PT. Astra Graphia Tbk	1	1	1
5	ASII	PT. Astra International Tbk	1	1	1
6	AUTO	PT. Astra Otoparts Tbk	1	1	1
7	BRPT	PT. Barito Pacific Tbk	1	1	1
8	BUDI	PT. Budi Acid Jaya Tbk	1	1	1
9	CTBN	PT. Citra Tubindo Tbk	1	1	1
10	DVLA	PT. Darya - Varia Laboratoria Tbk	1	1	1
11	FAST	PT. Fast Food Indonesia Tbk	0	0	0
12	FASW	PT. Fajar Surya Wisesa Tbk	1	1	1
13	GDYR	PT. Goodyear Indonesia Tbk	1	1	0
14	GJTL	PT. Gajah Tunggal Tbk	1	1	1
15	HEXA	PT. Hexindo Adiperkasa Tbk	1	1	1
16	HMSP	PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	1	1	1
17	IMAS	PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk	0	0	0
18	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	1	1	1
19	INTA	PT. Intraco Penta Tbk	1	0	1
20	INTP	PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	1	1	0
21	KAEF	PT. Kimia Farma (Persero)	1	1	1
22	KBLM	PT. Kabelindo Murni Tbk	1	1	1
23	KKGI	PT. Resource Alam Indonesia Tbk	1	1	1
24	KLBF	PT. Kalbe Farma Tbk	1	0	1
25	KONI	PT. Perdana Bangun Pusaka Tbk	0	0	0
26	LION	PT. Lion Metal Works Tbk	1	1	1
27	LTLS	PT. Lautan Luas Tbk	1	1	1
28	MDRN	PT. Modern Internasional Tbk	1	0	0
29	MERK	PT. Merck Tbk	1	1	1
30	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk	1	1	1
31	MLPL	PT. Multipolar Tbk	1	1	1
32	MTDL	PT. Metrodata Electronics Tbk	1	1	1
33	MYOH	PT. Myoh Technology Tbk	1	1	1
34	NIPS	PT. Nipress Tbk	1	0	1
35	POLY	PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk	1	1	1
36	PTSP	PT. Pioneerindo Gourmet International Tbk	1	1	1

37	RMBA	PT. Bentoel Internasional Investama Tbk	1	1	1
38	SIPD	PT. Sierad Produce Tbk	0	0	0
39	SMAR	PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk	1	1	1
40	SMCB	PT. Holcim Indonesia Tbk	0	1	1
41	SMGR	PT. Semen Gresik (Persero)	1	1	1
42	SOBI	PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk	1	1	0
43	SUGI	PT. Sugi Samapersada Tbk	1	1	1
44	TCID	PT. Mandom Indonesia Tbk	1	1	1
45	TIRA	PT. Tira Austenite Tbk	1	0	1
46	TPIA	PT. Tri Polyta Indonesia Tbk	1	1	0
47	TURI	PT. Tunas Ridean Tbk	1	1	1
48	ULTJ	PT. Ultra Jaya Milk Tbk	1	1	1
49	UNIC	PT. Unggul Indah Cahaya Tbk	0	1	1
50	UNTR	PT. United Tractor Tbk	1	1	1
51	UNVR	PT. Unilever Indonesia Tbk	1	1	1
52	VOKS	PT. Voksel Electric TBK	1	1	1



Karakteristik Komite Audit

Keanggotaan Komite Audit

Minimal 3

Jumlah anggota komite audit

NO	CODE	COMPANY	2008	2009	2010
1	AKRA	PT. AKR Corporindo Tbk	3	3	3
2	AMFG	PT. Asahimas Flat Glass Tbk	3	3	4
3	ARNA	PT. Arwana Citramulia Tbk	3	3	3
4	ASGR	PT. Astra Graphia Tbk	3	3	3
5	ASII	PT. Astra International Tbk	4	4	4
6	AUTO	PT. Astra Otoparts Tbk	3	3	3
7	BRPT	PT. Barito Pacific Tbk	3	3	3
8	BUDI	PT. Budi Acid Jaya Tbk	3	3	2
9	CTBN	PT. Citra Tubindo Tbk	4	4	3
10	DVLA	PT. Darya - Varia Laboratoria Tbk	3	3	3
11	FAST	PT. Fast Food Indonesia Tbk	3	3	3
12	FASW	PT. Fajar Surya Wisesa Tbk	3	3	3
13	GDYR	PT. Goodyear Indonesia Tbk	3	3	3
14	GJTL	PT. Gajah Tunggal Tbk	3	3	3
15	HEXA	PT. Hexindo Adiperkasa Tbk	3	3	3
16	HMSP	PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	3	3	3
17	IMAS	PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk	3	3	3
18	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	4	4	4
19	INTA	PT. Intraco Penta Tbk	3	3	3
20	INTP	PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	3	3	3
21	KAEF	PT. Kimia Farma (Persero)	3	3	3
22	KBLM	PT. Kabelindo Murni Tbk	3	3	3
23	KKGI	PT. Resource Alam Indonesia Tbk	3	3	3
24	KLBF	PT. Kalbe Farma Tbk	3	3	3
25	KONI	PT. Perdana Bangun Pusaka Tbk	3	3	3
26	LION	PT. Lion Metal Works Tbk	3	3	3
27	LTLS	PT. Lautan Luas Tbk	3	3	3
28	MDRN	PT. Modern Internasional Tbk	3	3	3
29	MERK	PT. Merck Tbk	2	2	3
30	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk	3	3	3
31	MLPL	PT. Multipolar Tbk	3	3	3
32	MTDL	PT. Metrodata Electronics Tbk	3	3	3
33	MYOH	PT. Myoh Technology Tbk	3	3	3
34	NIPS	PT. Nipress Tbk	4	4	4
35	POLY	PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk	3	3	3
36	PTSP	PT. Pioneerindo Gourmet International Tbk	3	3	3
37	RMBA	PT. Bentoel Internasional Investama Tbk	3	3	3

38	SIPD	PT. Sierad Produce Tbk	3	3	3
39	SMAR	PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk	3	3	3
40	SMCB	PT. Holcim Indonesia Tbk	3	3	3
41	SMGR	PT. Semen Gresik (Persero)	5	5	5
42	SOBI	PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk	3	3	3
43	SUGI	PT. Sugi Samapersada Tbk	3	3	3
44	TCID	PT. Mandom Indonesia Tbk	3	3	3
45	TIRA	PT. Tira Austenite Tbk	3	3	3
46	TPIA	PT. Tri Polyta Indonesia Tbk	3	3	3
47	TURI	PT. Tunas Ridean Tbk	4	4	4
48	ULTJ	PT. Ultra Jaya Milk Tbk	3	3	3
49	UNIC	PT. Unggul Indah Cahaya Tbk	4	4	4
50	UNTR	PT. United Tractor Tbk	3	3	3
51	UNVR	PT. Unilever Indonesia Tbk	3	3	3
52	VOKS	PT. Voksel Electric TBK	3	3	3



Karakteristik Komite Audit

Independensi Komite Audit

Dalam %
(persen)

Independensi Komite Audit

NO	CODE	COMPANY	2008	2009	2010
1	AKRA	PT. AKR Corporindo Tbk	100%	100%	100%
2	AMFG	PT. Asahimas Flat Glass Tbk	100%	100%	100%
3	ARNA	PT. Arwana Citramulia Tbk	100%	100%	100%
4	ASGR	PT. Astra Graphia Tbk	100%	100%	100%
5	ASII	PT. Astra International Tbk	100%	100%	100%
6	AUTO	PT. Astra Otoparts Tbk	100%	100%	100%
7	BRPT	PT. Barito Pacific Tbk	100%	100%	100%
8	BUDI	PT. Budi Acid Jaya Tbk	100%	100%	100%
9	CTBN	PT. Citra Tubindo Tbk	100%	100%	100%
10	DVLA	PT. Darya - Varia Laboratoria Tbk	100%	100%	100%
11	FAST	PT. Fast Food Indonesia Tbk	100%	100%	100%
12	FASW	PT. Fajar Surya Wisesa Tbk	100%	100%	100%
13	GDYR	PT. Goodyear Indonesia Tbk	100%	100%	100%
14	GJTL	PT. Gajah Tunggal Tbk	100%	100%	100%
15	HEXA	PT. Hexindo Adiperkasa Tbk	100%	100%	100%
16	HMSP	PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	100%	100%	100%
17	IMAS	PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk	100%	100%	100%
18	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	100%	100%	100%
19	INTA	PT. Intraco Penta Tbk	100%	100%	100%
20	INTP	PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	100%	100%	100%
21	KAEF	PT. Kimia Farma (Persero)	100%	100%	100%
22	KBLM	PT. Kabelindo Murni Tbk	100%	100%	100%
23	KKGI	PT. Resource Alam Indonesia Tbk	100%	100%	100%
24	KLBF	PT. Kalbe Farma Tbk	100%	100%	100%
25	KONI	PT. Perdana Bangun Pusaka Tbk	100%	100%	100%
26	LION	PT. Lion Metal Works Tbk	100%	100%	100%
27	LTLS	PT. Lautan Luas Tbk	100%	100%	100%
28	MDRN	PT. Modern Internasional Tbk	100%	100%	100%
29	MERK	PT. Merck Tbk	50%	50%	100%
30	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk	100%	100%	100%
31	MLPL	PT. Multipolar Tbk	100%	100%	100%
32	MTDL	PT. Metrodata Electronics Tbk	100%	100%	100%
33	MYOH	PT. Myoh Technology Tbk	100%	100%	100%
34	NIPS	PT. Nipress Tbk	100%	100%	100%
35	POLY	PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk	100%	100%	100%

36	PTSP	PT. Pioneerindo Gourmet International Tbk	100%	100%	100%
37	RMBA	PT. Bantoel Internasional Investama Tbk	100%	100%	100%
38	SIPD	PT. Sierad Produce Tbk	67%	67%	100%
39	SMAR	PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk	100%	100%	100%
40	SMCB	PT. Holcim Indonesia Tbk	100%	100%	67%
41	SMGR	PT. Semen Gresik (Persero)	100%	100%	100%
42	SOBI	PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk	100%	100%	100%
43	SUGI	PT. Sugi Samapersada Tbk	100%	100%	100%
44	TCID	PT. Mandom Indonesia Tbk	100%	100%	100%
45	TIRA	PT. Tira Austenite Tbk	100%	100%	100%
46	TPIA	PT. Tri Polyta Indonesia Tbk	100%	100%	100%
47	TURI	PT. Tunas Ridean Tbk	100%	100%	100%
48	ULTJ	PT. Ultra Jaya Milk Tbk	100%	100%	100%
49	UNIC	PT. Unggul Indah Cahaya Tbk	100%	100%	100%
50	UNTR	PT. United Tractor Tbk	100%	100%	100%
51	UNVR	PT. Unilever Indonesia Tbk	100%	100%	100%
52	VOKS	PT. Voksel Electric TBK	100%	100%	100%



Karakteristik Komite Audit**Proporsi Komisaris Independen**Dalam %
(persen)**Proporsi Komisaris
Independen**

NO	CODE	COMPANY	2008	2009	2010
1	AKRA	PT. AKR Corporindo Tbk	33%	33%	33%
2	AMFG	PT. Asahimas Flat Glass Tbk	43%	43%	33%
3	ARNA	PT. Arwana Citramulia Tbk	50%	50%	50%
4	ASGR	PT. Astra Graphia Tbk	33%	33%	33%
5	ASII	PT. Astra International Tbk	60%	50%	45%
6	AUTO	PT. Astra Otoparts Tbk	60%	33%	30%
7	BRPT	PT. Barito Pacific Tbk	33%	60%	60%
8	BUDI	PT. Budi Acid Jaya Tbk	40%	40%	33%
9	CTBN	PT. Citra Tubindo Tbk	33%	25%	40%
10	DVLA	PT. Darya - Varia Laboratoria Tbk	33%	33%	50%
11	FAST	PT. Fast Food Indonesia Tbk	40%	33%	33%
12	FASW	PT. Fajar Surya Wisesa Tbk	33%	33%	33%
13	GDYR	PT. Goodyear Indonesia Tbk	33%	33%	33%
14	GJTL	PT. Gajah Tunggal Tbk	33%	33%	33%
15	HEXA	PT. Hexindo Adiperkasa Tbk	33%	33%	33%
16	HMSP	PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	33%	40%	40%
17	IMAS	PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk	38%	43%	43%
18	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	30%	30%	30%
19	INTA	PT. Intraco Penta Tbk	33%	33%	33%
20	INTP	PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	43%	43%	43%
21	KAEF	PT. Kimia Farma (Persero)	60%	60%	60%
22	KBLM	PT. Kabelindo Murni Tbk	50%	50%	50%
23	KKGI	PT. Resource Alam Indonesia Tbk	43%	43%	43%
24	KLBF	PT. Kalbe Farma Tbk	33%	33%	33%
25	KONI	PT. Perdana Bangun Pusaka Tbk	33%	33%	33%
26	LION	PT. Lion Metal Works Tbk	33%	33%	33%
27	LTLS	PT. Lautan Luas Tbk	40%	40%	40%
28	MDRN	PT. Modern Internasional Tbk	33%	33%	33%
29	MERK	PT. Merck Tbk	33%	33%	67%
30	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk	40%	40%	40%
31	MLPL	PT. Multipolar Tbk	50%	50%	50%
32	MTDL	PT. Metrodata Electronics Tbk	33%	33%	33%
33	MYOH	PT. Myoh Technology Tbk	50%	50%	50%
34	NIPS	PT. Nipress Tbk	50%	50%	50%
35	POLY	PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk	33%	33%	33%
36	PTSP	PT. Pioneerindo Gourmet International Tbk	33%	33%	33%

37	RMBA	PT. Bentoel Internasional Investama Tbk	33%	50%	50%
38	SIPD	PT. Sierad Produce Tbk	50%	40%	67%
39	SMAR	PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk	38%	38%	38%
40	SMCB	PT. Holcim Indonesia Tbk	14%	57%	50%
41	SMGR	PT. Semen Gresik (Persero)	50%	50%	50%
42	SOBI	PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk	33%	33%	33%
43	SUGI	PT. Sugi Samapersada Tbk	50%	50%	50%
44	TCID	PT. Mandom Indonesia Tbk	40%	40%	40%
45	TIRA	PT. Tira Austenite Tbk	33%	25%	25%
46	TPIA	PT. Tri Polyta Indonesia Tbk	50%	50%	50%
47	TURI	PT. Tunas Ridean Tbk	40%	40%	40%
48	ULTJ	PT. Ultra Jaya Milk Tbk	33%	33%	33%
49	UNIC	PT. Unggul Indah Cahaya Tbk	33%	33%	33%
50	UNTR	PT. United Tractor Tbk	38%	38%	50%
51	UNVR	PT. Unilever Indonesia Tbk	75%	75%	75%
52	VOKS	PT. Voksel Electric TBK	50%	50%	50%



Karakteristik Komite Audit
Ketua Komite
Audit

1(satu) jika ketua komite audit orang dari luar perusahaan dan tidak punya hubungan apapun dengan direksi dan komisaris perusahaan. 0 (nol) jika sebaliknya

Ketua Komite Audit

NO	CODE	COMPANY	2008	2009	2010
1	AKRA	PT. AKR Corporindo Tbk	1	1	1
2	AMFG	PT. Asahimas Flat Glass Tbk	1	1	1
3	ARNA	PT. Arwana Citramulia Tbk	1	1	1
4	ASGR	PT. Astra Graphia Tbk	1	1	1
5	ASII	PT. Astra International Tbk	1	1	1
6	AUTO	PT. Astra Otoparts Tbk	1	1	1
7	BRPT	PT. Barito Pacific Tbk	1	1	1
8	BUDI	PT. Budi Acid Jaya Tbk	1	1	1
9	CTBN	PT. Citra Tubindo Tbk	1	1	1
10	DVLA	PT. Darya - Varia Laboratoria Tbk	1	1	1
11	FAST	PT. Fast Food Indonesia Tbk	1	1	1
12	FASW	PT. Fajar Surya Wisesa Tbk	1	1	1
13	GDYR	PT. Goodyear Indonesia Tbk	1	1	1
14	GJTL	PT. Gajah Tunggal Tbk	1	1	1
15	HEXA	PT. Hexindo Adiperkasa Tbk	1	1	1
16	HMSP	PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	1	1	1
17	IMAS	PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk	1	1	1
18	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	1	1	1
19	INTA	PT. Intraco Penta Tbk	1	1	1
20	INTP	PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	1	1	1
21	KAEF	PT. Kimia Farma (Persero)	1	1	1
22	KBLM	PT. Kabelindo Murni Tbk	1	1	1
23	KKGI	PT. Resource Alam Indonesia Tbk	1	1	1
24	KLBF	PT. Kalbe Farma Tbk	1	1	1
25	KONI	PT. Perdana Bangun Pusaka Tbk	1	1	1
26	LION	PT. Lion Metal Works Tbk	1	1	1
27	LTLS	PT. Lautan Luas Tbk	1	1	1
28	MDRN	PT. Modern Internasional Tbk	1	1	1
29	MERK	PT. Merck Tbk	0	0	1
30	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk	1	1	1
31	MLPL	PT. Multipolar Tbk	1	1	1
32	MTDL	PT. Metrodata Electronics Tbk	1	1	1
33	MYOH	PT. Myoh Technology Tbk	1	1	1
34	NIPS	PT. Nipress Tbk	1	1	1

35	POLY	PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk	1	1	1
36	PTSP	PT. Pioneerindo Gourmet International Tbk	1	1	1
37	RMBA	PT. Bantoel Internasional Investama Tbk	1	1	1
38	SIPD	PT. Sierad Produce Tbk	0	0	1
39	SMAR	PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk	1	1	1
40	SMCB	PT. Holcim Indonesia Tbk	1	1	0
41	SMGR	PT. Semen Gresik (Persero)	1	1	1
42	SOBI	PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk	1	1	1
43	SUGI	PT. Sugi Samapersada Tbk	1	1	1
44	TCID	PT. Mandom Indonesia Tbk	1	1	1
45	TIRA	PT. Tira Austenite Tbk	1	1	1
46	TPIA	PT. Tri Polyta Indonesia Tbk	1	1	1
47	TURI	PT. Tunas Ridean Tbk	1	1	1
48	ULTJ	PT. Ultra Jaya Milk Tbk	1	1	1
49	UNIC	PT. Unggul Indah Cahaya Tbk	1	1	1
50	UNTR	PT. United Tractor Tbk	1	1	1
51	UNVR	PT. Unilever Indonesia Tbk	1	1	1
52	VOKS	PT. Voksel Electric TBK	1	1	1



Karakteristik Komite Audit

Kompetensi

Dalam %
(persen)

NO	CODE	COMPANY	Kompetensi		
			2008	2009	2010
1	AKRA	PT. AKR Corporindo Tbk	100%	100%	100%
2	AMFG	PT. Asahimas Flat Glass Tbk	67%	67%	25%
3	ARNA	PT. Arwana Citramulia Tbk	67%	67%	67%
4	ASGR	PT. Astra Graphia Tbk	67%	67%	67%
5	ASII	PT. Astra International Tbk	75%	75%	75%
6	AUTO	PT. Astra Otoparts Tbk	67%	67%	67%
7	BRPT	PT. Barito Pacific Tbk	100%	100%	100%
8	BUDI	PT. Budi Acid Jaya Tbk	67%	67%	100%
9	CTBN	PT. Citra Tubindo Tbk	75%	75%	67%
10	DVLA	PT. Darya - Varia Laboratoria Tbk	67%	67%	67%
11	FAST	PT. Fast Food Indonesia Tbk	67%	67%	67%
12	FASW	PT. Fajar Surya Wisesa Tbk	100%	100%	100%
13	GDYR	PT. Goodyear Indonesia Tbk	67%	67%	67%
14	GJTL	PT. Gajah Tunggal Tbk	67%	100%	100%
15	HEXA	PT. Hexindo Adiperkasa Tbk	67%	33%	33%
16	HMSP	PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	67%	67%	67%
17	IMAS	PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk	67%	67%	67%
18	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	75%	75%	75%
19	INTA	PT. Intraco Penta Tbk	67%	67%	67%
20	INTP	PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	67%	67%	67%
21	KAEF	PT. Kimia Farma (Persero)	33%	33%	33%
22	KBLM	PT. Kabelindo Murni Tbk	67%	67%	67%
23	KKGI	PT. Resource Alam Indonesia Tbk	67%	67%	67%
24	KLBF	PT. Kalbe Farma Tbk	33%	33%	33%
25	KONI	PT. Perdana Bangun Pusaka Tbk	67%	67%	67%
26	LION	PT. Lion Metal Works Tbk	100%	100%	100%
27	LTLS	PT. Lautan Luas Tbk	67%	67%	67%
28	MDRN	PT. Modern Internasional Tbk	67%	67%	67%
29	MERK	PT. Merck Tbk	50%	50%	33%
30	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk	67%	67%	67%
31	MLPL	PT. Multipolar Tbk	67%	67%	67%
32	MTDL	PT. Metrodata Electronics Tbk	67%	67%	67%
33	MYOH	PT. Myoh Technology Tbk	67%	67%	67%
34	NIPS	PT. Nipress Tbk	50%	50%	50%
35	POLY	PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk	67%	67%	67%
36	PTSP	PT. Pioneerindo Gourmet International Tbk	67%	67%	67%
37	RMBA	PT. Bentoel Internasional Investama Tbk	67%	33%	33%

38	SIPD	PT. Sierad Produce Tbk	67%	67%	67%
39	SMAR	PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk	33%	33%	33%
40	SMCB	PT. Holcim Indonesia Tbk	33%	33%	33%
41	SMGR	PT. Semen Gresik (Persero)	60%	60%	60%
42	SOBI	PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk	67%	67%	67%
43	SUGI	PT. Sugi Samapersada Tbk	67%	67%	67%
44	TCID	PT. Mandom Indonesia Tbk	33%	33%	33%
45	TIRA	PT. Tira Austenite Tbk	67%	67%	67%
46	TPIA	PT. Tri Polyta Indonesia Tbk	100%	100%	100%
47	TURI	PT. Tunas Ridean Tbk	25%	25%	25%
48	ULTJ	PT. Ultra Jaya Milk Tbk	33%	33%	33%
49	UNIC	PT. Unggul Indah Cahaya Tbk	50%	50%	50%
50	UNTR	PT. United Tractor Tbk	67%	33%	33%
51	UNVR	PT. Unilever Indonesia Tbk	67%	67%	67%
52	VOKS	PT. Voksel Electric TBK	67%	67%	67%



LAMPIRAN 2 : OUTPUT SPSS

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Keanggotaan Komite Audit	156	2.00	5.00	3.1410	.43178
Independensi Anggota Komite	156	50.00	100.00	98.7244	7.19011
Proporsi Komisaris Independen	156	14.00	75.00	40.7244	10.35348
Ketua Komite Audit	156	.00	1.00	.9679	.17670
Kompetensi: Keahlian Keuanga	156	25.00	100.00	63.5769	19.27192
Ketepatan Pelaporan Keuanga	156	.00	1.00	.8462	.36196
Valid N (listwise)	156				

Ketepatan Pelaporan Keuangan * Keanggotaan Komite Audit Crosstabulation

Count

		Keanggotaan Komite Audit				Total
		2 orang	3 orang	4 orang	5 orang	
Ketepatan Pelaporan Keuangan	Tidak Tepat Waktu	0	20	4	0	24
	Tepat Waktu	2	113	14	3	132
Total		2	133	18	3	156

ketepatan Pelaporan Keuangan * Independensi Anggota Komite Audit Crosstabulati

Count

		Independensi Anggota Komite Audi			Total
		50 %	67 %	100 %	
Ketepatan Pelaporan Keuangan	Tidak Tepat Waktu	0	1	23	24
	Tepat Waktu	2	2	128	132
Total		2	3	151	156

Ketepatan Pelaporan Keuangan * Proporsi Komisaris Independen Crosstabulation

Count

		Proporsi Komisaris Independen												Total	
		14%	25%	30%	33%	3	40%	43%	45%	50%	57%	60%	67%		75%
Ketepatan Pelaporan Keuangan	Tidak Tepat Waktu	0	0	0	13	2	3	2	0	3	0	1	0	0	24
	Tepat Waktu	1	3	4	52	4	16	8	1	31	1	6	2	3	132
Total		1	3	4	65	6	19	10	1	34	1	7	2	3	156

Ketepatan Pelaporan Keuangan * Ketua Komite Audit Crosstabulation

Count

		Ketua Komite Audit		Total
		K. Audit dlm perusahaan	K. Audit di Luar Perusahaan	
Ketepatan Pelaporan Keuangan	Tidak Tepat Waktu	1	23	24
	Tepat Waktu	4	128	132
Total		5	151	156

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	6.085	7	.530

Ketepatan Pelaporan Keuangan * Kompetensi: Keahlian Keuangan Crosstabulation

Count

		Kompetensi: Keahlian Keuangan							Total
		25%	33%	50%	60%	67%	75%	100%	
Ketepatan Pelaporan Keuangan	Tidak Tepat Waktu	2	6	2	0	14	0	0	24
	Tepat Waktu	2	20	5	3	76	8	18	132
Total		4	26	7	3	90	8	18	156

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Coefficients Constant
0	147.526	-1.189

- a. Constant is included in the model
- b. Initial -2 Log likelihood: 147.526

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	122.616 ^a	.070	.122

- a. Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached. Final solution cannot be found.

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	Keanggotaan_ komite_audit	.052	.567	.008	1	.927	1.053
	Independensi_ Anggota_Audit	-1.242	1598.25	.000	1	.999	.289
	Proporsi_ Komisaris_ Independen	.035	.026	1.783	1	.182	1.036
	Ketua_Komite_Audit	42.074	52742.2	.000	1	.999	1.87E+018
	Kompetensi_ Keahlian_Keuangan	.035	.012	7.801	1	.005	1.035
	Constant	80.236	107083	.000	1	.999	7.01E+034

a. Variable(s) entered on step 1: Keanggotaan_komite_audit, Independensi_Anggota_Audit, Proporsi_Komisaris_Independen, Ketua_Komite_Audit, Kompetensi_Keahlian_Keuangan.

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Keanggotaan Komite Audit	.938	1.066
	Independensi Anggota Komite Audit	.704	1.541
	Proporsi Komisaris Independen	.981	1.019
	Ketua Komite Audit	.743	1.280
	Kompetensi: Keahlian Keuangan	.948	1.054

a. Dependent Variable: Ketepatan Pelaporan Keuangan